

INDIKATOR KESEJAHTERAAN RAKYAT KOTA MALANG 2017

<https://malangkota.bps.go.id>



**BADAN PUSAT STATISTIK
KOTA MALANG**

**INDIKATOR
KESEJAHTERAAN
RAKYAT
KOTA MALANG
2017**

<https://malangkota.bps.go.id>



**INDIKATOR
KESEJAHTERAAN RAKYAT
KOTA MALANG
2017**

<https://malangkota.bps.go.id>

INDIKATOR KESEJAHTERAAN RAKYAT KOTA MALANG 2017

Katalog BPS : 4102004.3573
No Publikasi : 35730.1815
Ukuran buku : 17,6 cm x 25 cm
Jumlah Halaman : vi + 67

Naskah :
Seksi Neraca Wilayah dan Analisis Statistik

Gambar Kulit :
Seksi Neraca Wilayah dan Analisis Statistik

Diterbitkan oleh :
BPS Kota Malang

Dicetak oleh :

<https://malangkota.bps.go.id>

KATA PENGANTAR

Pembangunan yang telah dilakukan oleh Pemerintah selama ini dimaksudkan untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat. Untuk mencapai tujuan tersebut, Pemerintah menjalankan program pembangunan yang berkesinambungan, menyeluruh, terarah dan terpadu. Agar program tersebut bisa berjalan sesuai yang direncanakan, maka perlu dievaluasi terhadap sejumlah indikator yang mencerminkan taraf kesejahteraan rakyat.

Publikasi "Indikator Kesejahteraan Rakyat Kota Malang 2017" ini menyajikan indikator-indikator yang dimaksud. Data yang digunakan bersumber dari BPS, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan Kementerian Kesehatan. Data yang berasal dari BPS, utamanya bersumber dari hasil Susenas, Sakernas, SDKI dan hasil Sensus Penduduk.

Hasil pengolahan data dari berbagai sumber tersebut akan disajikan dalam bentuk analisis indikator kependudukan, kesehatan dan gizi, pendidikan, ketenagakerjaan, taraf dan pola konsumsi, perumahan dan lingkungan, serta indikator kemiskinan dan indikator sosial lainnya.

Kami berharap semoga dengan kehadiran publikasi ini dapat memberikan manfaat bagi seluruh pengguna data, khususnya Pemerintah Daerah Kota Malang dalam melakukan evaluasi program pembangunan kesejahteraan rakyat.

Akhir kata, kami mengucapkan banyak terima kasih kepada seluruh pihak yang turut berpartisipasi dalam penyusunan indikator kesejahteraan rakyat dan semoga kehadiran publikasi ini bermanfaat bagi pengguna data secara luas.

Malang, Desember 2018
BPS Kota Malang
Kepala



Drs. MOHAMAD SARJAN

DAFTAR ISI

	Halaman
Kata Pengantar	iii
Daftar Isi	v
1. Kependudukan	1
1.1 Jumlah, Laju Pertumbuhan Penduduk dan rasio Jenis kelamin	2
1.2 Kepadatan dan Persebaran Penduduk	3
1.3 Angka Beban Ketergantungan	4
1.4 Fertilitas	6
1.5 Penggunaan Alat Kontrasepsi	7
2. Kesehatan	9
2.1 Derajat dan Status Kesehatan Penduduk	10
2.2 Tingkat Imunitas dan Gizi balita	14
2.3 Pemanfaatan Fasilitas Tenaga Kesehatan	17
3. Pendidikan	21
3.1 Angka Buta Huruf	22
3.2 Rata-rata Lama Sekolah	23
3.3 Tingkat Pendidikan	24
3.4 Tingkat Partisipasi Sekolah	25
3.5 Kualitas Pelayanan Pendidikan	28
3.6 Angka Putus Sekolah dan Angka Mengulang	30
4. Ketenagakerjaan	33
4.1 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) dan Tingkat Pengangguran Terbuka	34
4.2 Tingkat Pengangguran T erbuka	36
4.3. Tingkat Pengangguran Menurut Jenjang Pendidkanan.....	37

4.4. Lapangan Usaha dan Status Pekerjaan	38
4.5. Jumlah Jam Kerja	39
4.6. Upah/Gaji/Pendapatan Bersih	39
5. Taraf dan Pola Konsumsi	41
5.1. Pengeluaran Rumah Tangga	41
6. Perumahan dan Lingkungan	46
6.1. Kualitas Rumah Tangga	46
6.2. Fasilitas Rumah Tinggal	48
6.3. Status Kepemilikan Rumah Tangga	50
7. Kemiskinan	53
7.1. Perkembangan Penduduk Miskin di Jawa Timur	54
7.2. Garis Kemiskinan, Indeks Kedalaman Kemiskinan dan Indeks Keparahan Kemiskinan	54
7.3. Karakteristik Pendidikan Anggota Rumah Tangga	56
7.4. Karakteristik Ketenagakerjaan Anggota Rumah Tangga	57
7.5. Karakteristik Perumahan Rumah Tangga	59
8. Sosial Lainnya	63
8.1. Persentase Penduduk yang Melakukan Perjalanan	63
8.2. Persentase Penduduk Menurut Jenis Kegiatan	65
8.3. Persentase Penduduk yang Mempunyai Akses Teknologi Informasi dan Komunikasi	66
8.4. Persentase Penduduk Penerima Kredit Usaha dan Penerima Pelayanan Kesehatan Gratis	68
8.5. Persentase Penduduk yang Pernah Menjadi Korban Kejahatan	71
Lampiran	73



1. KEPENDUDUKAN

Isu kependudukan yang kian mengemuka belakangan ini berkaitan dengan pertumbuhan penduduk. Penduduk memang dapat menjadi modal dasar dalam pembangunan, namun di sisi lain penduduk juga dapat menjadi hambatan dalam mencapai tujuan pembangunan. Hal ini dimungkinkan terjadi apabila pertumbuhan jumlah penduduk tidak terkendali dan tidak diimbangi dengan pemenuhan kebutuhan penduduk seperti sandang, pangan, papan, dan kebutuhan akan pendidikan dan kesehatan yang layak.

Pemenuhan kebutuhan hidup yang tidak terpenuhi dikhawatirkan akan menimbulkan berbagai masalah yang dapat mengganggu kesejahteraan penduduk. Penyediaan pangan yang tidak mencukupi dapat menimbulkan terjadinya kelaparan dan dapat meningkatkan jumlah kematian penduduk. Selain itu, ketersediaan pemukiman yang tidak mencukupi dapat mengakibatkan munculnya pemukiman-pemukiman liar, kumuh dan tidak layak akibat sempitnya lahan untuk pemukiman seiring dengan meningkatnya jumlah penduduk. Masalah lain yang dapat muncul diantaranya terjadinya gangguan keamanan akibat maraknya aksi tindakan kriminalitas, menurunnya tingkat kesehatan masyarakat akibat sarana kesehatan yang kurang memadai, dan rendahnya kualitas sumber daya manusia terkait dengan sarana pendidikan yang terbatas.

Selain tingkat pertumbuhan penduduk, masalah komposisi penduduk dan ketimpangan distribusi penduduk juga menjadi masalah serius yang harus segera ditangani oleh pemerintah. Kebijakan pemerintah terkait masalah kependudukan baik dalam hal kuantitas maupun kualitas penduduk harus terus dilaksanakan dalam upaya memperbaiki kualitas hidup masyarakat sehingga kesejahteraan hidup masyarakat dapat diingkatkan.

Jumlah penduduk dan tingkat pertumbuhan penduduk yang tidak terkendali serta distribusi penduduk yang tidak merata menjadi masalah serius yang harus dihadapi.

1.1. Jumlah, Laju Pertumbuhan Penduduk dan Rasio Jenis Kelamin

Salah satu masalah klasik kependudukan yang terjadi sekarang ini dan terus menjadi perhatian pemerintah jumlah penduduk yang besar. Jumlah penduduk Kota Malang pada tahun 2017 berdasarkan Proyeksi Penduduk 2010 tercatat sebanyak 861.414 jiwa. Jumlah penduduk tersebut mengalami kenaikan sekitar 5.004 jiwa bila dibandingkan dengan jumlah penduduk tahun 2016 yang mencapai 856.410 jiwa. Bila dibandingkan dengan tujuh tahun sebelumnya yaitu pada tahun 2010, jumlah penduduk Kota Malang saat ini mengalami peningkatan sekitar 5,02 persen dari jumlah penduduk pada waktu pelaksanaan Sensus Penduduk tahun 2010 yang sebesar 820.243 jiwa. Dengan kata lain, selama kurun waktu enam tahun terakhir jumlah penduduk Kota Malang telah mengalami pertambahan penduduk sebesar 41.171 jiwa.

Tabel 1.1 Jumlah, Laju Pertumbuhan Penduduk dan Rasio Jenis Kelamin, 2012-2017

Tahun	Jumlah Penduduk (Juta Jiwa)	Laju Pertumbuhan per Tahun (%)	Rasio Jenis Kelamin
(1)	(2)	(3)	(4)
2012	834.527	0,73	97,09
2013	840.803	0,75	97,51
2014	845.973	0,62	97,20
2015	851.298	0,63	97,25
2016	856.410	0,60	97,27
2017	861.414	0,58	97,30

Sumber : Proyeksi Penduduk Kota Malang 2010-2020

Ditinjau dari laju pertumbuhan penduduk tiap tahunnya, laju pertumbuhan penduduk Kota Malang pada tahun 2017 tercatat sebesar 0,58 persen atau mengalami penurunan bila dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Pada tahun 2012, laju pertumbuhan penduduk Kota Malang sebesar 0,73 persen. Dalam kurun waktu 2012 s.d 2017 laju pertumbuhan menunjukkan keadaan yang berfluktuasi, tetapi cenderung menurun.

Gambar 1.1 Tingkat Pertumbuhan Penduduk Kota Malang, Tahun 2012-2017

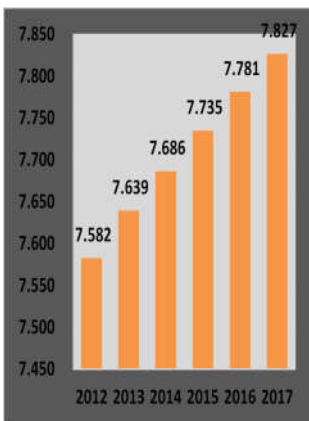


Sumber : Proyeksi Penduduk Indonesia 2010-2020

Penurunan laju pertumbuhan menunjukkan keberhasilan pemerintah daerah . Laju Pertumbuhan penduduk Kota Malang masih diatas Jawa Timur. Tahun 2016 Jawa Timur mencapai 0,56 persen.

Bila dilihat komposisi penduduk menurut jenis kelamin penduduk laki-laki dan perempuan, rasio jenis kelamin penduduk Kota Malang pada tahun 2017 sebesar 97,30. Ini berarti bahwa dari setiap 100 penduduk perempuan ada sebanyak 97 penduduk laki-laki. Dengan kata lain, jumlah penduduk laki-laki di Kota Malang lebih sedikit daripada jumlah penduduk perempuan. Rasio jenis kelamin Kota Malang lebih kecil dibandingkan dengan Jawa Timur, yaitu sebesar 97,48.

Gambar 1.2 Kepadatan Penduduk Kota Malang Tahun 2012 - 2017



Sumber : Proyeksi Penduduk Kota Malang 2010-2020

1.2. Kepadatan dan Persebaran Penduduk

Salah satu persoalan yang terkait dengan kependudukan yang masih harus dihadapi oleh Kota Malang yaitu masalah ketimpangan distribusi penduduk. Ketimpangan distribusi penduduk terlihat jelas antara penduduk di desa dan kota. Distribusi penduduk yang tidak merata menimbulkan masalah pada kepadatan penduduk dan tekanan penduduk di suatu wilayah.

Ada beberapa wilayah yang mempunyai jumlah penduduk yang sangat besar, di wilayah lain masih ada wilayah yang hanya dihuni oleh jumlah penduduk yang relatif sedikit. Hal ini sangat berpengaruh pada kondisi masyarakat setempat. Di satu sisi, wilayah dengan jumlah penduduk yang besar akan dihadapkan pada persoalan meningkatnya jumlah pengangguran karena tidak memadainya penyediaan lapangan pekerjaan, permasalahan kebutuhan lahan untuk pemukiman, serta tidak memadainya akses fasilitas pendidikan dan kesehatan serta masalah-masalah sosial lainnya. Di sisi lainnya, wilayah dengan dengan jumlah penduduk yang relatif sedikit akan memunculkan persoalan optimalisasi sumber daya alam terkait dengan kekurangan tenaga kerja padahal wilayah tersebut memiliki kekayaan sumber daya alam yang melimpah.

Kepadatan penduduk di Kota Malang dari tahun ke tahun mengalami peningkatan seiring dengan peningkatan jumlah penduduk

walaupun semakin tahun pertumbuhannya semakin melandai. Pada tahun 2012 kepadatan penduduk Kota Malang sekitar 7.528 jiwa per km², tahun 2013 meningkat menjadi sekitar 7.639 jiwa per km², selanjutnya pada tahun 2014 sekitar 7.686 per jiwa km², dan tahun 2014 sekitar 7.735 jiwa per km² serta tahun 2016 sekitar 7.781 jiwa per km². Sedangkan pada tahun 2017 kepadatan penduduk Kota Malang sekitar 7.827 jiwa per km².

Kota Malang merupakan kota terpadat di Jawa Timur setelah Kota Surabaya, yaitu sebesar 8.201 jiwa per km². Kecamatan Klojen meskipun pertumbuhan penduduknya rendah tetapi merupakan kecamatan terpadat di Kota Malang, kepadatannya mencapai 11.676 km².

1.3. Angka Beban Ketergantungan

Angka Beban Ketergantungan (*Dependency ratio*) merupakan salah satu indikator demografi yang penting. Semakin tinggi persentase angka beban ketergantungan menunjukkan semakin tingginya beban yang harus ditanggung penduduk yang produktif untuk membiayai hidup penduduk yang belum produktif dan tidak produktif lagi. Sedangkan persentase angka beban ketergantungan yang semakin rendah menunjukkan semakin rendahnya beban yang ditanggung penduduk yang produktif untuk membiayai penduduk yang belum produktif dan tidak produktif lagi.

Dampak keberhasilan pembangunan kependudukan juga dapat dilihat pada perubahan komposisi penduduk menurut umur seperti tercermin pada semakin rendahnya angka beban ketergantungan. Hal ini disebabkan dengan semakin kecilnya angka beban ketergantungan akan memberikan kesempatan yang semakin besar bagi penduduk usia produktif untuk meningkatkan kualitas dirinya.

Selama periode 2012-2016 angka beban ketergantungan setiap tahun tetap yaitu 37,64. Tahun 2017 angka beban ketergantungan meningkat 0,01 poin yaitu 37,65. Keadaan ini dapat diartikan bahwa periode 2012-2017 100 penduduk usia produktif dalam hal ini adalah kel. usia 15-64 tahun harus menanggung 37 sampai 38 penduduk usia tidak produktif, yaitu kelompok usia 0-14 tahun dan kel. usia 65 tahun ke atas.

Tabel 1.3 Komposisi Penduduk (%) dan Angka Beban Ketergantungan Kota Malang, Tahun 2012-2017

Tahun	0-14 Tahun	15-64 Tahun	65 Tahun +	Angka Beban Ketergantungan (jiwa)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
2012	180.952	606.324	47.251	37,64
2013	182.291	610.876	47.636	37,64
2014	183.388	614.628	47.957	37,64
2015	184.521	618.483	48.294	37,64
2016	185.605	622.188	46.617	37,64
2017	186.666	625.812	48.936	37,65

Sumber : Proyeksi Penduduk Kota Malang 2010-2020

Rasio ketergantungan yang meningkat perlu mendapat perhatian karena semakin banyak usia yang tidak produktif yang ditanggung oleh usia produktif. Kondisi ini menjadi peringatan awal untuk mempersiapkan kelompok usia produktif terserap di pasar kerja. Hal ini akan sangat terkait dengan potensi sumber daya manusia sebagai bagian dari komponen nilai tambah yang terkait dengan pertumbuhan ekonomi. Sebaliknya jika di sisi lain mereka dapat menciptakan instabilitas sosial dan politik jika diantara mereka banyak yang mereka tidak bekerja. Mereka dikatakan usia produktif tapi tidak dapat termanfaatkan tenaganya karena tidak terserap di pasar kerja.

1.4. Fertilitas

Kelahiran (fertilitas) merupakan salah satu faktor yang dapat memengaruhi besarnya penduduk di suatu wilayah selain kematian (mortalitas) dan perpindahan penduduk (mobilitas). Angka fertilitas yang tinggi apabila disertai angka mortalitas yang rendah akan menyebabkan penambahan penduduk yang meningkat. Apabila angka fertilitas tidak dapat terkendali maka akan menyebabkan terjadinya ledakan penduduk sehingga menyebabkan jumlah penduduk semakin membengkak dan memicu berbagai macam permasalahan penduduk di tengah-tengah kehidupan masyarakat. Di samping itu, ledakan penduduk yang terjadi akan menjadi beban negara semakin besar dan beresiko menghambat pembangunan nasional.

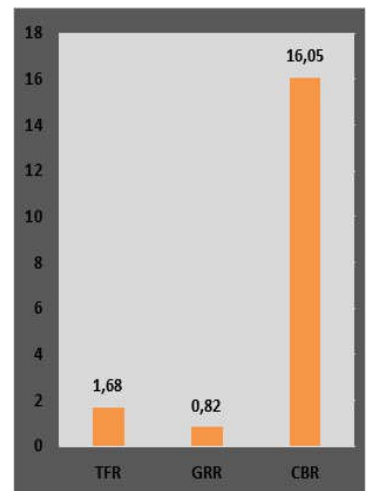
Indikator yang digunakan untuk mengukur fertilitas adalah Angka Kelahiran Total (*Total Fertility Rate/TFR*), Angka Kelahiran Kasar (*Crude Birth Rate/CBR*), Angka Reproduksi Kasar (*Gross Reproductive Rate/GRR*), . Indikator TFR mempunyai kegunaan untuk membandingkan keberhasilan antar wilayah dalam melaksanakan pembangunan sosial ekonomi, menunjukkan tingkat keberhasilan program KB, membantu para perencana program pembangunan untuk meningkatkan rata-rata usia kawin, meningkatkan program pelayanan kesehatan yang berkaitan dengan pelayanan ibu hamil dan perawatan anak, serta mengembangkan program penurunan tingkat kelahiran.

Pada Gambar 1.3 terlihat bahwa TFR Kota Malang sebesar 1,68. Hal ini menunjukkan bahwa rata-rata banyaknya anak yang dilahirkan oleh seorang wanita hingga selesai masa reproduksinya (usia 15-49 tahun) adalah 1 sampai 2 anak.

GRR adalah banyaknya bayi perempuan yang dilahirkan oleh perempuan selama masa reproduksi. Ukuran ini tidak memperhitungkan kemungkinan bayi perempuan meninggal sebelum mencapai masa reproduksinya. GRR Kota Malang tahun 2010 sebesar 0,82. Artinya terdapat 0 sampai 1 orang bayi perempuan yang dilahirkan oleh seorang perempuan selama masa reproduksinya.

CBR adalah banyaknya kelahiran pada tahun tertentu per 1.000 penduduk pada pertengahan tahun yang sama. Indikator CBR

Tabel 1.3
Indikator Fertilitas , 2010



digunakan untuk mengetahui tingkat kelahiran di suatu daerah tertentu pada waktu tertentu. CBR Kota Malang pada tahun 2010 sebesar 16,05. Artinya pada tahun 2010 banyaknya kelahiran sebanyak 16 anak per 1000 penduduk.

1.5 Penggunaan Alat/Cara KB

Program Keluarga Berencana (KB) merupakan salah satu program pemerintah yang bertujuan untuk menekan laju pertumbuhan penduduk, mengurangi angka kelahiran anak dan kematian ibu. Program KB dilakukan kontrasepsi/KB yang berbagai jenis/macamnya. Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) selaku instansi pemerintah yang menangani program KB ini mengharapkan cakupan akseptor KB terus meningkat. Terutama untuk kepesertaan KB dengan metode kontrasepsi jangka panjang (MKJP) seperti IUD dan Implant. Dengan cakupan KB yang meningkat, diharapkan laju pertumbuhan penduduk bisa dikendalikan lebih baik lagi.

Berdasarkan masa kerjanya, kontrasepsi dibedakan menjadi dua kelompok yaitu sementara (*reversible*) dan permanen. Pilihan kontrasepsi untuk menunda kehamilan pertama dan mengatur jarak kehamilan adalah kontrasepsi yang memiliki masa kerja bersifat sementara, baik jangka pendek maupun jangka panjang. Seseorang mempunyai pilihan untuk menggunakan jenis alat/cara KB tertentu dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain faktor keamanan, frekuensi pemakaian dan efek samping, terjangkau harganya, cara penggunaan yang dianggap paling praktis, efisien, minim resiko kegagalan dan resiko efek samping terhadap kesehatan pemakai dan memberikan kenyamanan bagi penggunanya.

Berdasarkan hasil Susenas tahun 2016-2017, persentase wanita berumur 15-49 tahun yang berstatus kawin yang sedang menggunakan alat/cara KB sudah mencapai di atas 50 persen yaitu masing masing sebesar 53,01 persen pada tahun 2016 dan 62,22 persen pada tahun 2017. Tabel 1.6 memperlihatkan bahwa dari berbagai macam alat/cara KB yang digunakan, suntikan paling banyak diminati., demikian juga AKDR/ IUD/spiral. Jika dibandingkan dengan tahun 2016 penggunaan AKDR/ IUD/Spiral dan Suntik peminatnya menurun dari 20,37 persen menjadi

18,50 persen, dari 37,70 persen menjadi 34,04 persen dan 37,70 persen menjadi 34,02 persen. Sedangkan pengguna Pil KB meningkat dari 15,77 persen menjadi 17,84 persen. dari 33,59 persen meningkat menjadi 37,59 persen.

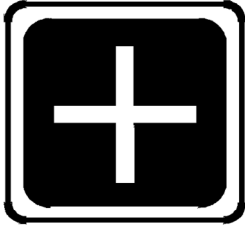
Tabel 1.5 Persentase Wanita Berumur 15-49 Tahun dan Berstatus Kawin yang sedang Menggunakan Alat/Cara Kontrasepsi Menurut Jenis Alat/Cara KB, 2016 dan 2017

Alat/Cara Kontrasepsi	2016	2017
(1)	(2)	(3)
MOW/Tubektomi	8,10	8,17
MOP/Vasektomi	0,96	1,59
AKDR/IUD/Spiral	20,32	18,10
Suntikan	37,70	34,02
Susuk KB/Norplant/Implanon/Alwalit	3,46	3,74
Pil	15,77	17,84
Kondom/Karet	2,18	4,69
Intravag/Tissue/Kondom Wanita	0,00	0,00
Cara Tradisional	11,52	11,85
% Wanita Yang Sedang Menggunakan Alat/Cara Kontrasepsi	53,01	62,22

Sumber : Hasil Susenas 2016-2017

Selain alat kontrasepsi AKDR/IUD/Spiral dan pil, beberapa alat kontrasepsi lain yang masih sering digunakan adalah MOW/Tubektomi, pil, Susuk KB/Norplant/Implanon/Alwalit dan cara Tradisional. Pada tahun 2016 penggunaan MOW/Tubektomi sebesar 8,10 persen dan meningkat sedikit menjadi 8,17 persen pada tahun 2017. Demikian juga penggunaan Susuk KB/Norplant/Implan mengalami peningkatan dari 3,46 persen pada tahun 2015 menjadi 3,74 persen pada tahun 2017. Penggunaan kondom juga mengalami peningkatan yang lumayan tinggi dari 2,18 persen pada tahun 2016 menjadi sebesar 4,69 persen pada tahun 2017. Cara Tradisional tahun 2017 meningkat sedikit dibandingkan dengan tahun 2016 yaitu dari 11,52 persen menjadi 11,85 persen.

Jenis alat/cara KB yang tidak ada peminatnya adalah intravag/tissue/kondom wanita. Hal ini diduga karena sosialisasi informasi masih kurang optimal sehingga banyak yang masih belum berminta memilih alat kontrasepsi ini.



2. KESEHATAN

Tingkat kesehatan merupakan indikator penting untuk menggambarkan mutu pembangunan manusia suatu wilayah. Semakin sehat kondisi suatu masyarakat, maka akan semakin mendukung proses dan dinamika pembangunan ekonomi suatu negara/wilayah semakin baik, khususnya dalam meningkatkan tingkat produktivitas. Berkaitan dengan pembangunan kesehatan, pemerintah sudah melakukan berbagai program kesehatan untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat khususnya memberikan kemudahan akses pelayanan publik bidang kesehatan seperti puskesmas yang sasaran utamanya menurunkan tingkat angka kesakitan masyarakat, menurunkan Angka Kematian Ibu dan Bayi, menurunkan prevalensi gizi buruk dan gizi kurang dan meningkatkan Angka Harapan Hidup.

Upaya Pemerintah melalui program-program pembangunan yang telah dilakukan diantaranya meningkatkan akses masyarakat terhadap fasilitas kesehatan dan meningkatkan pelayanan kesehatan yang bermutu dan berkualitas, merata serta terjangkau, yaitu dengan memberikan pelayanan kesehatan gratis bagi penduduk miskin; menyediakan sumber daya kesehatan yang kompeten dan mendistribusikan tenaga kesehatan secara merata ke seluruh wilayah, meningkatkan sarana dan prasarana kesehatan melalui pembangunan puskesmas, rumah sakit; polindes dan posyandu serta menyediakan obat-obatan yang terjangkau oleh masyarakat.

Keberhasilan atas upaya-upaya yang telah dilakukan dalam bidang kesehatan dapat diukur dengan beberapa indikator kesehatan antara lain Angka Harapan Hidup, Angka Kematian Bayi, Angka Kesakitan, Prevalensi Balita Kurang Gizi, dan indikator lain yang berkaitan dengan akses terhadap fasilitas pelayanan kesehatan seperti persentase balita yang persalinannya ditolong oleh tenaga medis, persentase penduduk yang berobat jalan ke rumah sakit, dokter/klinik, puskesmas, dan lainnya, serta rasio tenaga kesehatan per penduduk.

2.1 Derajat dan Status Kesehatan Penduduk

Beberapa indikator yang digunakan untuk menggambarkan kondisi tingkat kesehatan masyarakat antara lain angka kelangsungan hidup bayi (AKHB) dan usia harapan hidup.

Angka kelangsungan hidup bayi (AKHB) adalah probabilitas bayi hidup sampai dengan usia 1 tahun. Angka kelangsungan hidup bayi dihitung dengan angka 1 (satu) dikurangi angka kematian bayi. Sementara Angka Kematian Bayi (AKB) dihitung dengan jumlah kematian bayi usia dibawah 1 tahun dalam kurun waktu setahun per 1.000 kelahiran hidup pada tahun yang sama. Angka kelangsungan hidup bayi merupakan salah satu indikator keberhasilan pembangunan suatu daerah, terutama di sektor kesehatan.

Angka kelangsungan hidup bayi dapat dilihat dari data kematian Per 1000 kelahiran hidup hasil estimasi yang diperbaiki sekitar 977,72 pada tahun 2016. Data tersebut memberikan makna bahwa dari 1.000 kelahiran hidup terdapat 977 sampai 978 bayi yang mencapai usia 1 tahun. Sementara angka kematian bayi pada tahun 2016 diproyeksikan menurun menjadi 17,04 Per 1.000 kelahiran hidup. Dengan demikian angka kelangsungan hidup bayi berbanding terbalik dengan angka kematian bayi. Semakin rendah angka kematian bayi, maka semakin besar peluang kelangsungan hidup bayi.

Tabel 2.1 Angka Kematian Bayi (AKB) dan Kelangsungan Hidup Bayi (AKHB) Di Kota Malang Tahun 2012 – 2016

No.	Indikator	2012	2013	2014	2015	2016
1.	Angka Kematian Bayi (AKB)	22,28	20,76	19,55	18,33	17,04
2.	Angka Kelangsungan Hidup Bayi (AKHB)	977,72	979,24	980,45	981,67	982,92

Sumber : BPS Provinsi Jawa Timur, Angka Estimasi diperbaiki

Kota Malang diprediksi dapat menekan angka kematian bayi menjadi 17,04 pada tahun 2016 sehingga menjadikan Kota Malang Kota yang paling rendah Angka Kematian Bayi terendah di Jawa Timur

Masa kehamilan merupakan masa yang rawan kesehatan, baik kesehatan ibu yang mengandung maupun janin yang dikandungnya sehingga dalam masa kehamilan perlu dilakukan pemeriksaan secara teratur. Hal ini dilakukan guna menghindari gangguan sedini mungkin dari segala sesuatu yang membahayakan terhadap kesehatan ibu dan janin yang dikandungnya. Setiap tahunnya diseluruh dunia diperkirakan 4 juta bayi meninggal pada tahun pertama kehidupannya dan dua pertiganya meninggal pada bulan pertama. Penyebab utama kematian pada minggu pertama kehidupan adalah komplikasi kehamilan dan persalinan seperti asfiksia, sepsis, dan komplikasi berat lahir rendah (Depkes RI, 2008).

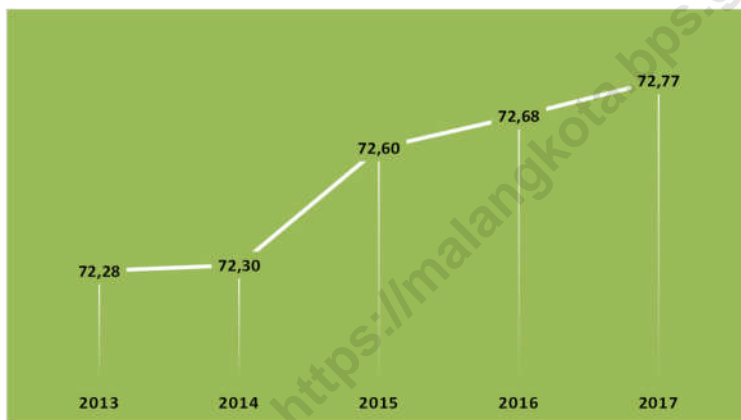
Keberhasilan program kesehatan dan program pembangunan sosial ekonomi pada umumnya dapat dilihat dari peningkatan usia harapan hidup penduduk dari suatu negara. Meningkatnya perawatan kesehatan melalui Puskesmas, meningkatnya daya beli masyarakat akan meningkatkan akses terhadap pelayanan kesehatan, mampu memenuhi kebutuhan gizi dan kalori, mampu mempunyai pendidikan yang lebih baik sehingga memperoleh pekerjaan dengan penghasilan yang memadai, yang pada gilirannya akan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dan memperpanjang usia harapan hidupnya

Definisi Angka Harapan Hidup pada suatu umur x adalah rata-rata tahun hidup yang masih akan dijalani oleh seseorang yang telah berhasil mencapai umur x , pada suatu tahun tertentu, dalam situasi mortalitas yang berlaku di lingkungan masyarakatnya. Angka usia harapan hidup pada waktu lahir adalah perkiraan lama hidup rata-rata penduduk dengan asumsi tidak ada perubahan pola mortalitas menurut umur. Angka Harapan Hidup merupakan alat untuk mengevaluasi kinerja pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan penduduk pada umumnya, dan meningkatkan derajat kesehatan pada khususnya. Angka Harapan Hidup yang rendah di suatu daerah harus diikuti dengan

program pembangunan kesehatan, dan program sosial lainnya termasuk kesehatan lingkungan, kecukupan gizi dan kalori termasuk program pemberantasan kemiskinan

Idealnya Angka Harapan Hidup dihitung berdasarkan Angka Kematian Menurut Umur (*Age Specific Death Rate/ASDR*) yang datanya diperoleh dari catatan registrasi kematian secara bertahun-tahun sehingga dimungkinkan dibuat Tabel Kematian. Tetapi karena sistem registrasi penduduk di Indonesia belum berjalan dengan baik maka untuk menghitung Angka Harapan Hidup digunakan cara tidak langsung dengan program *Mortpak Lite*.

Gambar 2.1
Angka Harapan Hidup Penduduk Kota Malang



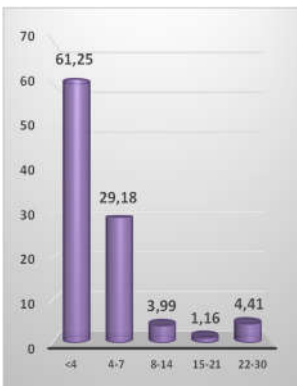
Sumber : BPS Kota Malang

Dari hasil penghitungan propyeksi yang dilakukan oleh BPS RI, rata-rata AHH di Kota Malang selama 5 tahun terakhir (2013 – 2017) menunjukkan trend meningkat yaitu dari 72,28 (2013) menjadi 72,77 (2017). Artinya peluang bayi yang dilahirkan hidup akan memiliki peluang untuk hidup sampai umur 72 sampai 73 tahun. AHH Kota Malang lebih tinggi dibandingkan Jawa Timur , yaitu 70,34 sampai 70.80 tahun.

Merujuk pada konsep yang diterapkan oleh BPS dalam Susenas, maka Morbiditas (angka kesakitan) menunjukkan adanya gangguan/ keluhan kesehatan yang mengakibatkan terganggunya aktivitas sehari-hari baik dalam melakukan pekerjaan, bersekolah, mengurus rumah tangga maupun melakukan aktivitas lainnya. Pada umumnya keluhan kesehatan yang mengindikasikan adanya suatu penyakit yang biasa dialami oleh penduduk adalah panas, batuk, pilek, asma/napas sesak, diare, sakit kepala berulang, sakit gigi, campak, dll. Semakin banyak penduduk yang mengalami gangguan kesehatan berarti semakin rendah derajat kesehatan di wilayah tersebut dan menunjukkan angka kesakitan yang tinggi di wilayah tersebut (penduduknya banyak yang mengalami sakit).

Berdasarkan hasil Susenas 2017, sekitar 34,88 persen penduduk mempunyai keluhan kesehatan (referensi survei dalam sebulan yang lalu). Angka ini di atas angka Jawa Timur yang sebesar 31,48 persen. Sedangkan penduduk yang mengalami sakit sebesar 48,08 persen (keluhan kesehatan yang dirasakan menyebabkan terganggunya aktivitas sehari-hari). Angka ini masih dibawah angka Jawa Timur yaitu sekitar 49,35 persen. Dari penduduk yang mengalami keluhan kesehatan yang menyebabkan terganggu aktivitas keseharian, terdapat sekitar 61,25 persen dengan lama hari terganggu kurang dari 4 hari dan terdapat 38,75 persen dengan lama hari terganggu 4-7 hari.

Gambar 2.1
Persentase Penduduk di Kota Malang Menurut Jumlah Hari Sakit Dalam Sebulan yang Lalu, 2017

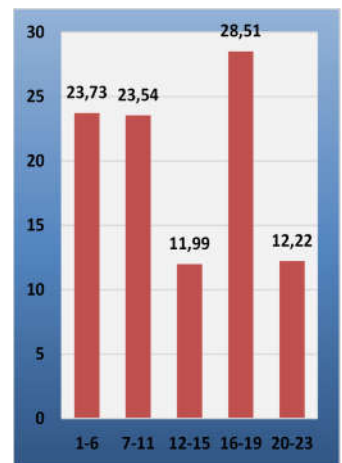


2.2 Tingkat Imunitas dan Gizi Balita

Ibu yang sedang mengandung harus mulai memperhatikan asupan yang dimakannya dan juga harus melakukan imunisasi, karena hal tersebut merupakan gizi dan imunisasi awal seorang anak dimulai. Kemudian dilanjutkan setelah sang anak lahir dengan memberikan Air Susu Ibu (ASI) sangat dianjurkan untuk diberikan ke pada bayi, karena ASI merupakan makanan pertama bayi yang memiliki peranan penting dalam proses tumbuh kembang anak. ASI memiliki manfaat sangat besar untuk jangka panjang, karena ASI adalah nutrisi terbaik dan terlengkap, mengandung protein dan zat-zat gizi berkualitas tinggi serta mengandung zat antibodi yang berguna untuk pertumbuhan dan perkembangan kecerdasan bayi, dan melindungi tubuh bayi dari alergi dan diare serta penyakit infeksi lainnya. Oleh sebab itu pemerintah menganjurkan agar seorang ibu dapat memberikan ASI eksklusif kepada bayi sejak dilahirkan sampai 6 bulan ke depan, tanpa menambahkan atau mengganti makanan/minuman lain. Selanjutnya setelah bayi berusia 6 bulan keatas dilanjutkan bersama dengan makanan tambahan dan ASI tetap diberikan hingga usia 2 tahun.

Kualitas dan kuantitas ASI yang diberikan pada bayi sangat berkaitan dengan asupan gizi makanan yang dikonsumsi oleh ibu, terutama saat ibu hamil dan setelah melahirkan (masa menyusui). ASI sebenarnya memang langsung dikenalkan pada bayi mulai saat lahir, proses ini disebut dengan Inisiasi Menyusui Dini (IMD). Dari data Susenas 2017 persentase perempuan pernah kawin usia 15-49 tahun di Kota Malang yang melahirkan anak lahir hidup kurang dari 2 tahun yang lalu sebanyak 84,44 persen sudah melakukan IMD kurang dari 1 jam setelah kelahiran bayi, namun masih ada sebanyak 15,56 persen yang melakukan IMD lebih dari 1 hari. Dalam perkembangannya sebanyak 98,7 persen anak dibawah usia dua tahun pernah menerima ASI dan 1,23 persen tidak merasakan ASI. Dari sekitar 93,05 persen baduta yang menerima ASI sebagian besar menerima ASI kurang dari 1

Gambar 2.3
Persentase Baduta di Kota Malang Menurut Lamanya Pemberian ASI, 2017



tahun yaitu sebesar 57,33 persen sedangkan yang menerima hingga usia 23 bulan sebesar 14,72 persen.

Hal yang tak kalah penting dalam melindungi balita pada masa tumbuh kembangnya dan menjaga kesehatannya hingga dewasa adalah pemberian Imunisasi. Imunisasi merupakan prosedur pencegahan penyakit menular yang diberikan kepada anak sejak masih bayi hingga remaja. Melalui program ini, tubuh diperkenalkan dengan bakteri atau virus tertentu yang sudah dilemahkan atau dimatikan dengan tujuan untuk merangsang sistem imun guna membentuk antibodi. Antibodi yang terbentuk setelah imunisasi berguna untuk melindungi tubuh dari serangan mikro organisme tersebut di masa yang akan datang. Inilah yang disebut dengan kekebalan aktif.

Bayi yang baru lahir memang telah memiliki antibodi dari ibunya yang diterima saat masih di dalam kandungan. Namun kekebalan ini hanya dapat bertahan hingga beberapa minggu atau bulan saja. Setelah itu bayi akan rentan terhadap berbagai jenis penyakit dan perlu mulai memproduksi antibodinya sendiri. Dengan imunisasi, sistem kekebalan tubuh anak akan siap untuk menghadapi penyakit menular tertentu di masa depan, sesuai dengan jenis vaksin yang diberikan. Karena imunisasi secara tepat pada balita dapat bermanfaat dalam memberikan kekebalan terhadap penyakit-penyakit tertentu. Sehingga melalui imunisasi diharapkan dapat menurunkan jumlah kematian bayi dan balita.

Pada tahun 2017 balita di Kota Malang yang sudah mendapatkan imunisasi lengkap (satu kali untuk BCG dan Campak, serta tiga kali untuk DPT, Polio, dan Hepatitis B) sebanyak 69,35 persen dan jika dibandingkan dengan tahun 2016 mengalami peningkatan sekitar 3,24 persen.

Dalam kurun waktu 5 tahun berdasarkan hasil Susenas 2015-2017 pemberian imunisasi kepada anak umur 12-59 bulan sudah mencapai lebih dari 90 persen, untuk hamper semua jenis imunisasi, kecuali imunisasi campak yang masih sekitar 70 persen. Persentase pemberian imunisas cenderung menurun dibandingkan tahun 2016, kecuali pemberiaan imunisasi Campak meningkat dari 74,43 persen menjadi 77,45 persen.. Tahun 2015 pemberian imunisas Polio mencapai 100 persen.

Tabel 2.4 Persentase Anak Umur 12-59 Bulan yang Pernah Diimunisasi Menurut Jenis Imunisasi, Tahun 2013 – 2017

Jenis Iminusasi	2013	2014	2015	2016	2017
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
BCG	94,73	97,90	96,08	96,83	95,39
DPT	96,79	97,43	98,93	95,93	93,33
Polio	95,87	96,70	100	97,80	95,39
Campak	78,32	80,72	76,15	74,43	77,45
Hepatitis B	92,15	95,75	97,48	96,73	93,65

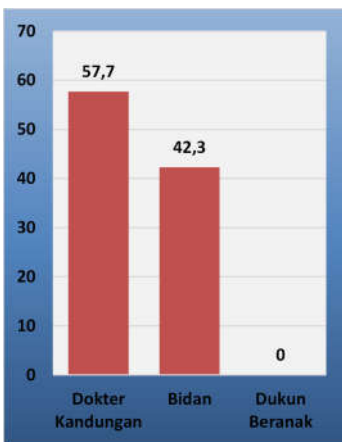
Sumber : Statistik Kesejahteraan Rakyat Provinsi Jawa Timur 2013, 2014, 2015, 2015, 2016 dan 2017

2.3 Pemanfaatan Fasilitas Tenaga Kesehatan

Untuk menurunkan Angka Kematian Ibu (AKI) salah satunya adalah dengan meningkatkan pertolongan persalinan oleh tenaga medis dan meningkatkan pelayanan neonatal, karena dapat mempengaruhi keselamatan ibu dan bayinya. Penolong persalinan yang ideal adalah tenaga medis karena mereka telah menerapkan proses persalinan yang memenuhi standar kesehatan. Oleh sebab itu, pemerintah selalu berupaya untuk memperluas akses, sarana pelayanan serta tenaga kesehatan dengan cara meningkatkan jumlah maupun kualitasnya. Seperti meningkatkan pelayanan kebidanan dengan menempatkan bidan di desa-desa, seperti yang tercantum dalam Rencana Strategis Kementerian Kesehatan 2010-2014 telah ditetapkan dalam Perpres No. 5 tahun 2010 yaitu meningkatkan pengembangan dan pendayagunaan SDM kesehatan yang merata dan bermutu.

Dari hasil Susenas 2017 diperoleh gambaran bahwa perempuan pernah kawin usia 15-49 tahun di Kota Malang yang melahirkan anak lahir hidup kurang dari 2 tahun yang lalu berdasarkan tempat melahirkan anak terakhir terlihat bahwa yang melahirkan di RS Bersalin/klinik sebesar 44,04 persen diurutkan teratas dan disusul RS Pemerintah/Swasta/RSIA diurutkan kedua sebesar 30,82 persen, selanjutnya di Praktek Nakes sebanyak 20,79 persen dan di Puskesmas/Pustu sebanyak 4,35 persen.

Gambar 2.
Persentase Balita Menurut
Penolong Persalinan Kelahiran
Terakhir, 2017



Pada umumnya pemanfaatan fasilitas kesehatan oleh penduduk sangat erat terkait dengan kondisi sosial ekonomi penduduk dan kondisi wilayah tempat tinggal mereka berada. Dampak perbedaan kualitas kesehatan yang nyata antara penduduk di perdesaan dengan penduduk perkotaan ini dapat disebabkan oleh perbedaan ketersediaan dan jarak menuju ke fasilitas pelayanan kesehatan tersebut, ditambah lagi perilaku penduduk itu sendiri. Tingginya persentase penduduk di daerah perkotaan yang memanfaatkan berobat ke praktek dokter/klinik, mengingat lebih mudahnya akses dan kualitas pelayanannya jauh lebih baik dibandingkan dengan di daerah perdesaan. Sebagai dampaknya, akan terlihat berbagai keluhan dan masalah kesehatan segera tertangani lebih cepat dan lebih baik.

Dalam mengatasi keluhan kesehatan yang dialami, ada sekitar 40,49 persen penduduk berobat jalan sedangkan 59,51 persen tidak melakukan berobat jalan. Berbagai alasan penduduk tidak berobat jalan dalam mengatasi keluhan kesehatannya, yang paling besar adalah karena mereka mengobati sendiri keluhan kesehatannya yaitu sebesar 63,69 persen dan berikutnya 35,42 persen karena merasa tidak perlu untuk berobat jalan karena keluhan kesehatan yang dirasakan dianggap biasa dan tidak perlu berobat jalan. Penduduk yang berobat jalan kebanyakan mendatangi tempat praktek dokter/bidan yaitu sebesar 42,32 persen dan berikutnya yang banyak didatangi adalah Puskesmas/Pustu sebesar 26,47 persen. Tempat berobat jalan yang paling sedikit dikunjungi oleh penduduk Kota Malang adalah UKBM (Upaya Kesehatan Bersumberdaya Masyarakat) seperti Poskesdes, Polindes, Posyandu, dan Balai Pengobatan sebanyak 0,75 persen. Sedangkan pengobatan tradisional/alternative dikunjungi oleh sebanyak 1,89 persen penduduk Kota Malang yang berobat jalan. Dari data yang dihasilkan oleh Susenas ini menunjukkan bahwa mayoritas penduduk Kota Malang lebih banyak mendatangi praktek dokter/bidan dikarenakan banyaknya praktek dokter/bidan yang sudah tersedia di setiap kelurahan.

Tabel 2.7 Persentase Penduduk yang Berobat Jalan Menurut Tempat Berobat, Tahun 2013 – 2017

Tempat Berobat	2013	2014	2015	2016	2017
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Rumah Sakit	11,52	15,70	13,78	18,38	23,14
Praktek Dokter atau klinik	36,90	40,05	50,11	46,72	54,41
Puskesmas	46,19	36,77	37,38	35,77	26,47
Petugas Kesehatan	7,09	9,48	0,18	0,14	0,75
Pengobatan Tradisional	1,04	2,00	1,67	2,18	1,89
Dukun bersalin & lainnya	1,01	0,50	2,18	0,87	0,20

Sumber : Hasil Susenas 2013-2017

<https://malangkota.bps.go.id>



3. PENDIDIKAN

Di era globalisasi modern saat ini, perkembangan di segala bidang keilmuan semakin pesat. Dari berbagai perkembangan ilmu pengetahuan tersebut, salah satu yang menjadi perhatian para ilmuwan adalah mengenai konsep pembangunan. Paradigma baru mengenai konsep pembangunan ini dipicu oleh kegagalan konsep pembangunan era sebelum tahun 1970-an yang menitikberatkan pembangunan hanya pada pertumbuhan ekonomi saja. Namun, pada kenyataannya pembangunan untuk mencapai kesejahteraan masyarakat tidak bisa hanya dipandang dari aspek ekonomi saja, tetapi juga dari aspek sosial lainnya, salah satunya adalah aspek pendidikan.

Pendidikan merupakan cikal bakal dari terbentuknya kualitas sumber daya manusia yang handal. Dengan pendidikan yang baik akan melahirkan generasi penerus bangsa yang cerdas dan kompeten. Oleh karena itu, pendidikan juga merupakan salah satu faktor penting kewibawaan sebuah negara di mata dunia internasional.

Upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui bidang pendidikan telah lama dilakukan oleh pemerintah Indonesia. Pembangunan pendidikan di Indonesia sejak tahun 1980-an ditempuh melalui empat kebijakan pokok yaitu memperoleh kesempatan pendidikan, peningkatan mutu pendidikan, efisiensi manajemen pendidikan dan peningkatan relevansi pendidikan mulai dari anak usia dini sampai dengan usia lanjut.

Memasuki tahun era tahun 1990-an, pendidikan Indonesia menekankan pada pengembangan sumber daya manusia yang mampu menjawab tantangan masa depan melalui pelaksanaan wajib belajar 9 tahun yang ditunjang dengan program kejar paket. Dan sebagai tindak lanjut dari keseriusan pemerintah di bidang pendidikan, maka diterbitkan Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan bahwa anggaran pendidikan baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah sekurang-kurangnya sebesar 20 persen dari total anggaran belanja.

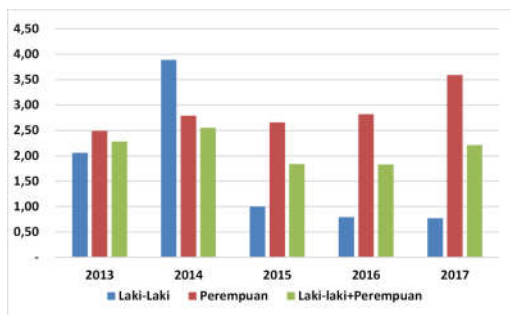
Pembahasan mengenai indikator bidang pendidikan di Kota Malang menjadi penting untuk melihat sejauh mana capaian di bidang pendidikan sekaligus mengidentifikasi tantangan ke depan sebagai bahan evaluasi pemerintah dalam rangka mencapai kesejahteraan masyarakatnya. Pembahasan tersebut akan difokuskan pada indikator capaian di bidang pendidikan seperti angka buta huruf, rata-rata lama sekolah, tingkat pendidikan, dan tingkat partisipasi sekolah. Sedangkan indikator tantangan di bidang pendidikan akan difokuskan pada kualitas pelayanan pendidikan, serta angka putus sekolah dan angka mengulang.

3.1 Angka Buta Huruf

Secara harfiah, angka buta huruf merupakan suatu ukuran persentase penduduk usia sepuluh (10) tahun ke atas yang tidak bisa membaca dan menulis. Dapat membaca dan menulis yakni diartikan dapat membaca dan menulis surat/kalimat sederhana atau dapat membaca dan menulis huruf Braille.

Sebagai salah satu kota terbesar kedua di Jawa Timur dikatakan belum terbebas dari buta huruf. Badan Pusat Statistik mencatat bahwa angka buta huruf di Kota Malang 2017 mencapai 2,21 persen. Dari penduduk usia di atas 10 tahun, sekitar 2,21 persen belum bisa membaca dan menulis. Terbanyak adalah kelompok usia di atas 59 tahun, penduduk tua yang dahulu belum punya kesempatan untuk mengenyam pendidikan.

Dari 38 kabupaten/kota di Jawa Timur, Kota Malang urutan ke lima terendah angka buta hurufnya, setelah Kota Mojokerto, Kota Madiun, Kabupaten Siidoarjo dan Kota Surabaya. Sementara persentase penduduk laki-laki yang buta huruf sebesar 0,72 persen dan perempuan 3,59 persen, disini terlihat bahwa persentase buta huruf laki-laki lebih rendah dibanding angka buta huruf perempuan.



Gambar 3.1. Angka Buta Huruf Menurut Jenis Kelamin di Kota Malang, 2013-2017 (Persen)

Sumber: Susenas 2013, 2014, 2015, 2016 dan 2017

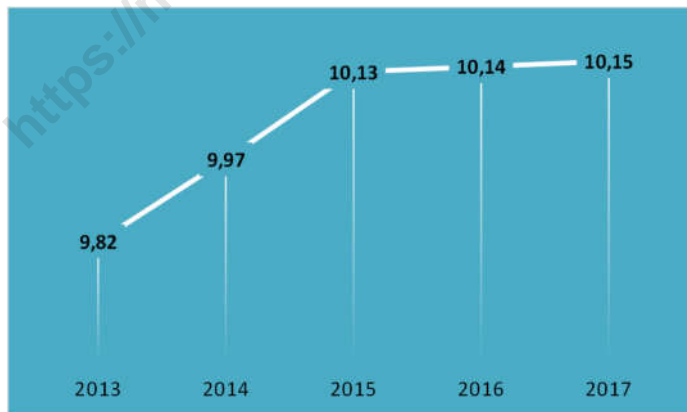
3.2 Rata-Rata Lama Sekolah

Rata-rata lama sekolah Kota Malang tahun 2017 mencapai 10,15 tahun, artinya bahwa secara rata-rata penduduk Kota Malang yang berusia 15 tahun ke atas mengenyam bangku pendidikan sekolah selama 10 sampai 11 tahun atau setara dengan kelas X-XI tingkat SMA. Capaian ini menunjukkan bahwa target pemerintah dengan program wajib belajar 9 tahun telah tercapai di Kota Malang. Dalam kurun waktu 2013 - 2017 terlihat rata-rata lama sekolah penduduk Kota Malang cenderung meningkat. Tetapi peningkatan ditahun 2017 tidak terlalu tinggi dibandingkan tahun-tahun sebelumnya, yaitu hanya 0,01 poin,.

Rata-rata lama sekolah penduduk laki-laki lebih lama dibandingkan dengan penduduk perempuan. Rata-rata lama sekolah penduduk perempuan mencapai 9,96 tahun, sedangkan rata-rata lama sekolah penduduk laki-laki mencapai 10,95 tahun.

Rata-rata lama sekolah Kota Malang menduduki posisi keempat tertinggi di Jawa Timur setelah Kota Surabaya, Sidoarjo dan Kota Madiun.

Gambar 3.2. Rata-rata Lama Sekolah di Kota Malang, 2013-2017 (Tahun)



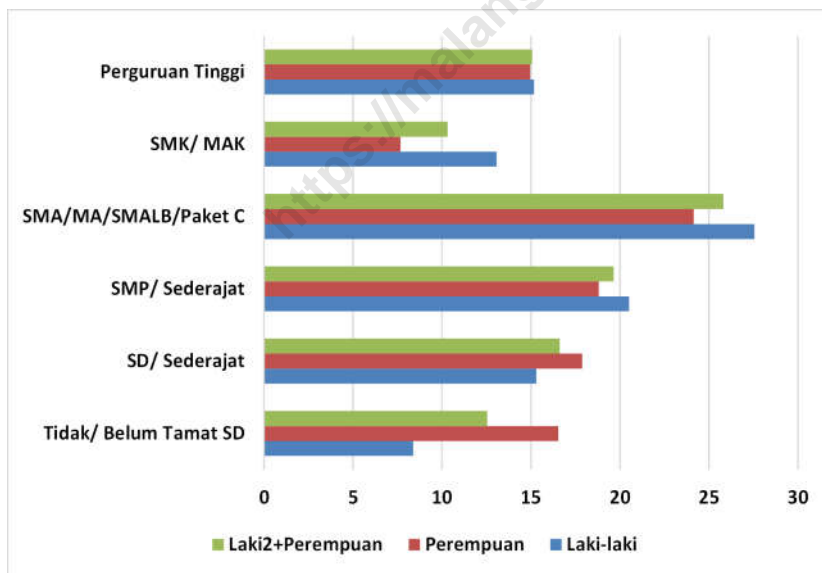
Sumber: BPS Kota Malang, 2013, 2014, 2015, 2016 dan 2017

3.3 Tingkat Pendidikan

Secara umum, tingkat pendidikan di Kota Malang tidak begitu tinggi. Persentase penduduk Kota Malang usia 15 tahun ke atas yang tidak mempunyai ijazah SD sebanyak 12,55 persen, tamat sekolah dasar (SD) atau sederajatnya sebesar 16,62 persen dan tamat sekolah menengah pertama (SMP) sebesar 19,64 persen. Dengan demikian, sebanyak 48,81 persen penduduk Kota Malang usia 15 tahun ke atas hanya tamatan SMP ke bawah.

Program wajib belajar 9 tahun yang dicanangkan pemerintah dirasakan belum optimal. Hal ini terlihat dari persentase penduduk usia 15 tahun ke atas yang tamat sekolah menengah atas (SMA) ke atas hanya 51,18 persen yang terdiri dari tamat SMA atau sederajatnya sebesar 25,81 persen, sedangkan tamat diploma (D1/D3) dan tamat sarjana ke atas (S1/D4/S2/S3) masing-masing sebesar 10,31 persen dan 15,06 persen.

Gambar 3.3. Persentase Penduduk Kota Malang Usia 15 Tahun ke Atas Menurut Jenis Kelamin dan Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan, 2017



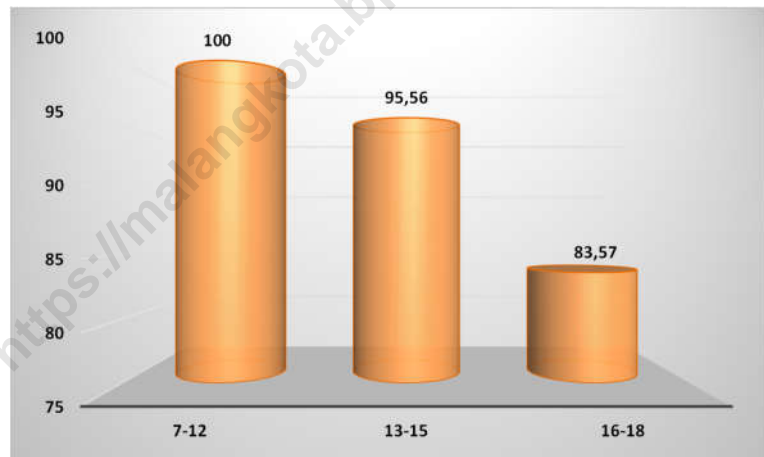
Sumber: Statistik Kesejahteraan Rakyat Kota Malang Kota Malang 2017

3.4 Tingkat Partisipasi Sekolah

Untuk mengetahui capaian di bidang pendidikan, salah satunya dengan melihat tingkat partisipasi sekolah penduduknya. Indikator yang digunakan untuk mengkaji tingkat partisipasi sekolah diantaranya adalah angka partisipasi sekolah (APS), angka partisipasi kasar (APK) dan angka partisipasi murni (APM).

Angka partisipasi sekolah merupakan ukuran daya serap lembaga pendidikan terhadap penduduk usia sekolah. APS digunakan sebagai indikator dasar untuk melihat akses penduduk pada fasilitas pendidikan khususnya bagi penduduk usia sekolah. Semakin tinggi APS semakin besar jumlah penduduk yang berkesempatan mengenyam bangku pendidikan.

Gambar 3.5 Angka Partisipasi Sekolah Kota Malang Menurut Kelompok Usia, 2017



Sumber: Statistik Kesejahteraan Rakyat Kota Malang Kota Malang 2017

Secara umum, APS per masing-masing kelompok usia sekolah ditunjukkan pada gambar 3.5. APS kelompok usia 7-12 tahun Kota Malang tahun 2017 telah mencapai 100 berarti bahwa penduduk Kota Malang usia 7-12 tahun 100 persen atau hampir seluruhnya telah mengenyam pendidikan di sekolah (tanpa memandang tingkatan sekolahnya). APS kelompok usia 13-15 tahun Kota Malang tahun 2017 sebesar 95,56 lebih rendah dari APS kelompok usia 7-12 tahun. Interpretasinya sama dengan sebelumnya, bahwa penduduk Kota Malang usia 13-15 tahun 95,56 persen memiliki akses terhadap fasilitas pendidikan di sekolah. Sementara itu, APS kelompok usia 16-18 tahun Kota Malang tahun 2017 sebesar 83,57 persen. Angka ini lebih kecil lagi dibandingkan APS kelompok usia 13-15 tahun. Hal ini menunjukkan bahwa ada sekitar 16,43 persen penduduk Jawa Timur usia 16-18 tahun tidak melanjutkan lagi ke jenjang SMA.

Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa APS dapat digunakan untuk melihat partisipasi penduduk kelompok usia tertentu dalam pendidikan formal. Namun, APS tidak dapat mengukur ketepatan jenjang pendidikan yang sedang dijalani kelompok usia tertentu tersebut. Untuk melihat partisipasi penduduk kelompok usia tertentu yang mengenyam pendidikan formal sesuai dengan kelompok usianya tersebut digunakan indikator Angka Partisipasi Murni (APM). Secara ringkas, APM dijabarkan dengan rumus sebagai berikut:

$$APM = \frac{\text{Banyaknya penduduk usia sekolah tertentu yang sedang sekolah pada jenjang yang sesuai}}{\text{Banyaknya penduduk usia sekolah pada jenjang yang sesuai}} \times 100$$

Secara umum APM menurut kelompok usia di Kota Malang ditunjukkan pada gambar 3.8. Penduduk usia 7-12 tahun yang mengenyam bangku pendidikan Sekolah Dasar di Kota Malang tahun 2016 sebesar 97,86 persen. Sementara itu, penduduk usia 13-15 tahun yang sedang bersekolah pada jenjang Sekolah Menengah Pertama (SMP) tahun 2015 sebanyak 84,02 persen. APM kelompok usia 16-18 tahun di Kota Malang tahun 2017 hanya sebesar 62,73 persen, terendah dibandingkan APM kelompok usia 7-12 tahun dan ke

Gambar 3.8 Angka Partisipasi Murni (APM) menurut Kelompok Usia Sekolah di Kota Malang, 2016-2017



Sumber: Statistik Kesejahteraan Rakyat Kota Malang Kota Malang 2017

lompok usia 13-15 tahun. APM kelompok usia 16-18 tahun sebesar 62.73 persen dapat diartikan penduduk Kota Malang tahun 2017 usia 16-18 tahun yang mengenyam bangku pendidikan Sekolah Menengah Atas (SMA) hanya 62,73 persen

3.5 Kualitas Pelayanan Pendidikan

Keberhasilan pembangunan di bidang pendidikan salah satunya ditentukan oleh kualitas pelayanan pendidikan. Kualitas pelayanan pendidikan telah menjadi perhatian utama pemerintah dalam rangka meningkatkan kualitas sumber daya manusia penerus generasi bangsa. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional No 129a/U/2004 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pendidikan merupakan salah satu upaya pemerintah dalam menjamin kualitas pendidikan di Indonesia.

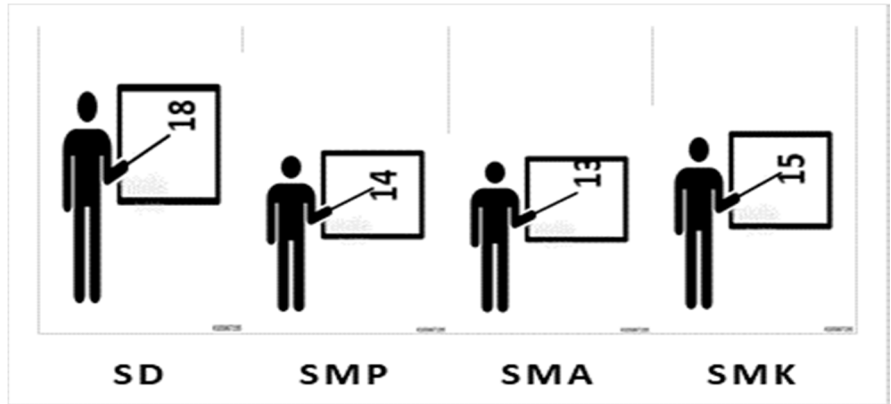
Pengukuran kualitas pelayanan pendidikan dapat dilihat dari rasio murid/guru, rasio guru/sekolah dan rasio murid/kelas. Rasio tersebut untuk melihat seberapa memadai fasilitas sekolah (sekolah/kelas/guru) yang disediakan untuk memenuhi permintaan jasa pendidikan. Dalam hal ini pemerintah sebagai penyelenggara negara sangat berperan penting dalam menyediakan fasilitas pendidikan di atas.

Rasio murid/guru menurut jenjang pendidikan di Kota Malang selama 4 tahun terakhir belum menunjukkan perubahan yang signifikan. Hal tersebut tampak jelas pada gambar 3.9. bahwa secara besaran angka rasio murid/guru semakin kecil. Rasio murid/guru diartikan sebagai banyaknya murid yang dibimbing oleh satu guru. Semakin kecil rasio murid/guru maka semakin sedikit murid yang dibimbing oleh guru, dengan demikian diharapkan transfer ilmu dari guru pada anak didiknya semakin baik dan kualitas pelayanan pendidikan semakin bagus.

Secara spasial, rasio murid/guru menurut jenjang pendidikan di Kota Malang menunjukkan semakin kecil dengan semakin tingginya jenjang pendidikan. Jenjang SD rasio nya sebesar 18, SMP 14, SMA 13, sedangkan jenjang SMK lebih tinggi yaitu 15.

Selain rasio murid/guru, indikator yang dapat digunakan untuk menganalisis kualitas pelayanan adalah rasio murid/sekolah. Rasio murid/sekolah menggambarkan kemampuan sekolah dalam menampung peserta didik. Rasio murid-sekolah menurut jenjang pendidikan SD di Kota Malang cenderung menurun. Hal ini disebabkan semakin banyaknya berkurangnya unit sekolah. Untuk efisiensi operasional beberapa sekolah negeri digabung menjadi satu karena ada kecenderungan jumlah muridnya semakin sedikit. Sedangkan

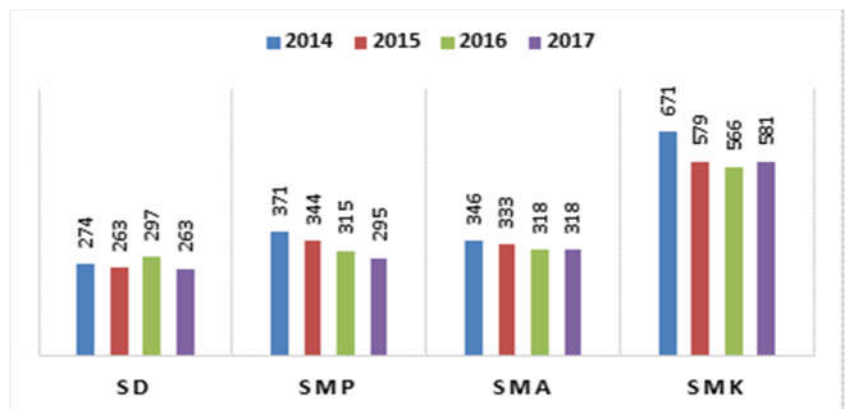
Gambar 3.9 Rasio Murid-Guru Menurut Jenjang Pendidikan di Kota Malang Tahun 2017



Sumber: Dinas Pendidikan Kota Malang

jenjang SMP cenderung menurun. Ada penambahan jumlah sekolah pada empat tahun terakhir., demikian juga jenjang SMK juga cenderung menurun pada empat tahun terakhir. Sedangkan jenjang SMA rasio berfluktuasi, tetapi cenderung stagnan. Peningkatan kualitas pelayanan pendidikan tidak hanya didorong oleh penambahan jumlah guru dan unit sekolah (faktor input) saja, namun yang perlu menjadi perhatian adalah keseluruhan sistem pendidikan. Sebuah sistem mengandung rangkaian kegiatan mulai dari input, proses, output serta faktor internal dan eksternal, dimana masing-masing komponen/kegiatan tersebut mempunyai fungsi tertentu untuk mencapai tujuan utama sistem tersebut.

Gambar 3.10 Rasio Murid-Sekolah Menurut Jenjang Pendidikan di Kota Malang, 2014-2017



Sumber: Dinas Pendidikan Kota Malang

<https://malangkota.bps.go.id>



4. KETENAGAKERJAAN

Memantapkan pembangunan secara menyeluruh di berbagai bidang dengan menekankan pencapaian daya saing kompetitif perekonomian berlandaskan keunggulan sumber daya alam dan sumber daya manusia berkualitas serta kemampuan ilmu dan teknologi yang terus meningkat menjadi sasaran pembangunan ideal suatu daerah.

Disinilah letak isu pentingnya faktor ketenagakerjaan itu berperan dalam sebuah aktifitas bisnis dan perekonomian unggulan Jawa Timur. Ketenagakerjaan masih menjadi permasalahan yang harus dihadapi oleh pemerintah untuk menerapkan strategi dan langkah tepat untuk mendukung kebijakan pembangunan daerah.

Tenaga kerja merupakan modal bagi geraknya roda pembangunan. Kondisi jumlah dan komposisi tenaga kerja akan terus mengalami perubahan seiring dengan berlangsungnya proses demografi. Karena itu pentingnya data mengenai perkembangan ketenagakerjaan sangatlah penting bagi pemerintah terkait dalam pengambil kebijakan yang tepat sasaran.

Bab ini akan memberikan gambaran mengenai beberapa indikator tenaga kerja yang bersumber dari Survei Angkatan Kerja Nasional (SAKERNAS) kondisi Februari dan Agustus tahun 2014-2015. Indikator tersebut, antara lain Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK), Tingkat pengangguran Terbuka (TPT), persentase pengangguran menurut tingkat pendidikan, persentase penduduk yang bekerja menurut status pekerjaan, persentase penduduk bekerja menurut lapangan usaha dan jumlah jam kerja, serta persentase pekerja menurut kelompok upah, gaji/ pendapatan bersih.

Faktor penyebab bertambahnya tingkat pengangguran di Jawa Timur disebabkan oleh adanya kesenjangan antara supply tenaga kerja yang tersedia dengan demand atau kebutuhan perusahaan/ usaha, minimnya informasi tentang tenaga kerja yang tersedia maupun kebutuhan dunia usaha dari sisi kualitas tenaga kerja.

4.1. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)

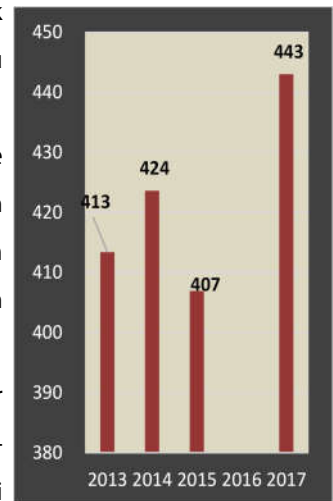
Penduduk yang termasuk bukan angkatan kerja adalah penduduk usia kerja (15 tahun dan lebih) yang masih sekolah, mengurus rumah tangga atau melaksanakan kegiatan lainnya selain kegiatan pribadi. Penduduk yang termasuk angkatan kerja adalah penduduk usia kerja (15 tahun dan lebih) yang bekerja, atau punya pekerjaan namun sementara tidak bekerja dan pengangguran. Penduduk yang termasuk bukan angkatan kerja adalah penduduk usia kerja (15 tahun dan lebih) yang masih sekolah, mengurus rumah tangga atau melaksanakan kegiatan lainnya selain kegiatan pribadi.

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) merupakan rasio antara jumlah angkatan kerja dengan jumlah penduduk usia kerja/ usia produktif 15 tahun ke atas. Selain TPAK, dalam analisis angkatan kerja dikenal pula indikator untuk mengukur pengangguran yaitu Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) . Pengangguran terbuka didefinisikan sebagai orang yang mencari pekerjaan atau yang sedang mempersiapkan usaha atau yang tidak mencari pekerjaan karena merasa tidak mungkin lagi mendapatkan pekerjaan, termasuk mereka yang baru mendapat kerja tetapi belum mulai bekerja.

Angka TPAK dan TPT bisa mengindikasikan besarnya persentase penduduk usia kerja yang aktif secara ekonomi disuatu negara/wilayah serta besarnya persentase angkatan kerja yang termasuk dalam pengangguran. Idealnya capaian hasil pembangunan suatu wilayah dikatakan tinggi apabila angka TPAK tinggi dan TPT yang rendah.

Jumlah angkatan kerja di Kota Malang pada tahun 2017 sebesar 443 ribu orang, Jumlah angkatan kerja dalam kurun waktu 4 tahun terakhir ini cenderung fluktuatif. Hal ini sangat terkait dengan partisipasi angkatan kerja (TPAK) di Kota Malang pada kurun waktu tersebut.

Gambar 4.1
Jumlah Angkatan Kerja,
2013-2017 (Ribu Orang)



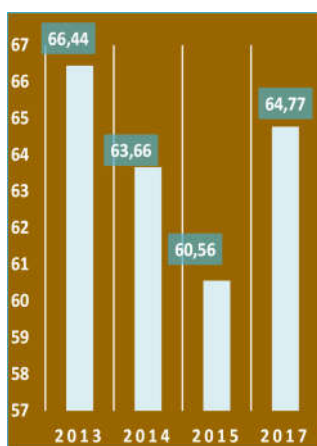
Sumber : BPS Kota Malang

Tabel 4.1 Penduduk Jawa Timur Usia 15 Tahun ke Atas Menurut Jenis Kegiatan Utama, Tahun 2014,2015 dan 2017

Jenis Kegiatan	2014	2015	2017
(1)	(2)	(3)	(4)
Penduduk 15 Tahun ke Atas	665.465	671.937	684.015
Angkatan Kerja	423.631	406.935	443.035
Penduduk yang Bekerja	393.050	377.329	411.042
Pengangguran Terbuka	30.581	29.606	31.993
Bukan Angkatan Kerja	241.834	265.002	240.980
Sekolah	97.114	115.451	76.669
Mengurus Rumah Tangga	124.864	122.571	136.231
Lainnya	19.856	26.980	28.080
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) (%)	63,66	60,56	64,77
Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) (%)	7,22	7,28	7,22
Pekerja Tidak Penuh	56.255	52.223	69.567
Setengah Penganggur	16.985	15.086	21.175
Paruh Waktu	39.270	37.137	48.392

Sumber : BPS Kota Malang

Gambar 4.2 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK), 2013-2017



Sumber : BPS Kota Malang

Meningkatnya jumlah angkatan kerja, berdampak pada Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) di Kota Malang. Pada Agustus 2015, TPAK Kota Malang tercatat mencapai angka 63,62 persen. Sedangkan Tahun 2017 naik menjadi 64,77 persen dan . Secara umum, angka ini menunjukkan bahwa 64,77 persen penduduk Kota Malang yang berusia 15 tahun ke atas memutuskan untuk ikut aktif di pasar kerja. Sedangkan 35,63 persennya memutuskan untuk fokus sekolah, mengurus rumah tangga, maupun memiliki kegiatan di luar kegiatan ekonomi seperti kaum lanjut usia (lansia).

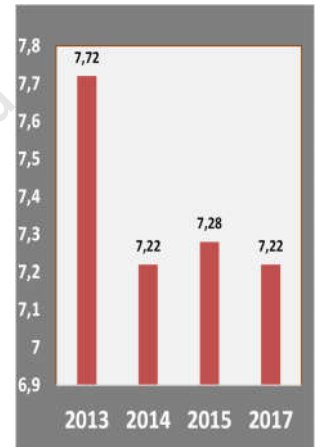
4.2. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)

Pengangguran atau tuna karya adalah istilah untuk orang yang tidak bekerja sama sekali, sedang mencari pekerjaan, mereka yang tak punya pekerjaan dan mempersiapkan usaha, mereka yang tak punya pekerjaan dan tidak mencari pekerjaan karena merasa tidak mungkin mendapatkan pekerjaan atau mereka yang sudah punya pekerjaan tetapi belum mulai bekerja atau seseorang yang sedang berusaha mendapatkan pekerjaan yang layak. Pengangguran umumnya disebabkan karena jumlah pencari kerja tidak sebanding dengan jumlah lapangan kerja yang ada yang mampu menyerapnya. Pengangguran seringkali menjadi masalah dalam perekonomian karena dengan adanya pengangguran produktivitas dan pendapatan masyarakat akan berkurang sehingga dapat menyebabkan timbulnya kemiskinan dan masalah-masalah sosial lainnya.

Pengangguran di Kota Malang pada tiga tahun terakhir (2013 – 2017) menunjukkan keadaan yang fluktuatif. Pada Tahun 2013 angka pengangguran di Kota Malang sekitar 33.623 jiwa. Angka ini mengalami penurunan menjadi 30.581 jiwa pada Tahun 2014 dan menjadi 29.606 jiwa pada Tahun 2015, tahun 2017 meningkat lagi menjadi 31.993 jiwa. Penurunan pengangguran ini dikarenakan banyaknya angkatan kerja yang beralih ke bukan angkatan kerja (sekolah, mengurus rumah tangga, dan lainnya). Informasi ini tentunya menjadi hal yang positif bagi kinerja pemerintah dalam menyediakan lapangan pekerjaan bagi penduduknya. Seiring dengan perkembangan ekonomi yang sedang berlangsung di Kota Malang dimana pembangunan fisik untuk sarana perumahan semakin-^{*} intens memiliki kapasitas menampung tenaga kerja.

Indikator utama ketenagakerjaan yang sering digunakan sebagai indikasi keberhasilan dalam menangani masalah pengangguran di suatu wilayah adalah Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT). TPT merupakan perbandingan antara jumlah penganggur terhadap jumlah angkatan kerja. Dari data yang disajikan pada Gambar 14, dapat dilihat bahwa angka TPT pada Tahun 2017 Kota Malang mencapai 7,28 persen atau meningkat sedikit dibandingkan Tahun 2015 yaitu sebesar 7,22. Angka

Gambar 4.3 Tingkat Partisipasi Terbuka (TPT), 2013, 2014, 2015, 2017



Sumber : BPS Kota Malang

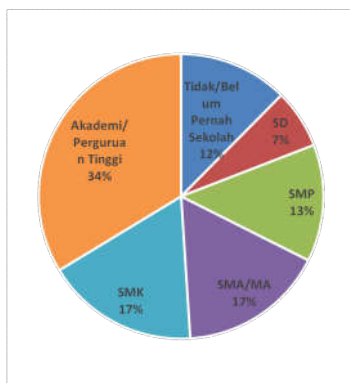
TPT di Kota Malang sebesar 7,22 persen tersebut lebih besar dibandingkan angka TPT Jawa Timur yaitu sebesar 4,47 persen. TPT Kota Malang merupakan terbesar ke-2 di Jawa Timur setelah Kota Kediri yaitu 8,46 persen.

4.3. Tingkat Pengangguran Menurut Jenjang Pendidikan

Mendapatkan pekerjaan yang layak tentunya diharapkan oleh setiap orang. Salah satu usaha untuk mendapatkan kesempatan itu adalah dengan pendidikan tinggi yang ditamatkan. Dengan semakin ketatnya tingkat persaingan di lapangan usaha serta keterbatasan ketersediaan lapangan usaha, sebagian orang berusaha dengan meningkatkan kualitas ketrampilan yang dimiliki. Namun seiring dengan kondisi tersebut muncul permasalahan yaitu lulusan pendidikan tinggi masih banyak yang tidak terserap pada lapangan usaha tersebut, salah satunya disebabkan karena sebagian besar lulusan tinggi cenderung enggan menerima pekerjaan yang tidak sesuai dengan jenis keahlian dan jenjang pendidikan yang ditamatkan. Sehingga sebagian dari mereka yang tidak mendapatkan pekerjaan menjadi penganggur.

Potret pengangguran di Kota Malang dapat dilihat pada gambar 4.4. TPT terbanyak terjadi pada penduduk lulusan Akademi/ Perguruan Tinggi yaitu mencapai 33,68 persen. Seperti kita ketahui jumlah mahasiswa yang ada di Kota Malang hampir 100 ribu orang. Sebagian besar mereka adalah anak-anak kos. Ketika mereka telah menyelesaikan kuliahnya, mereka tidak langsung kembali ke tempat asalnya tetapi masih menetap di Malang yang secara konsep masih menjadi penduduk Kota Malang. Disamping itu mereka juga tidak langsung mendapatkan pekerjaan. Sehingga secara konsep mereka termasuk golongan pengangguran. Keadaan inilah yang mendorong besarnya pengangguran pendidikan akademi/ perguruan tinggi. Di Kota Malang. Demikian juga dengan lulusan SMK, TPT mencapai 17,35 persen. Pilihan untuk meneruskan ke jenjang SMK merupakan pilihan dengan harapan segera mendapatkan kerja. Tetapi hal ini tidak diikuti dengan kesempatan kerja yang sesuai dengan lulusan pada jenjang SMK tersebut. akhirnya menambah tinggi persaingan untuk mendapatkan pekerjaan yang sesuai

Gambar 4.4 Tingkat Pengangguran Menurut Jenjang Pendidikan, 2017



Sumber : BPS Kota Malang

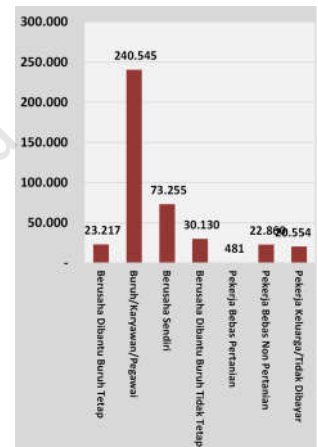
dengan lulusan SMA kejuruan sehingga mempunyai daya saing kerja.

4.3. Lapangan Usaha dan Status Pekerjaan

Berdasarkan hasil Sakernas 2017, secara umum persentase penduduk yang bekerja pada sektor perdagangan mengalami penurunan dibanding tahun 2015 dari 34,25 persen menjadi 31,46 persen. Penurunan juga terjadi pada sector Jasa kemasyarakatan, yaitu dari 29,76 persen turun menjadi 28,36 persen. Tetapi tidak terjadi pada sektor industri dan Jasa Keuangan yang mengalami peningkatan. Sektor industri meningkat dari 14,31 persen menjadi 17,05 persen., sedangkan sektor Jasa keuangan dari 6,26 persen menjadi 7,69 persen. Hal ini mengindikasikan terjadinya pergeseran komposisi tenaga kerja dan lapangan pekerjaan dari sektor perdagangan dan jasa kemasyarakatan ke sektor industri dan jasa keuangan

Pada tahun 2017 jumlah penduduk yang bekerja sebagai buruh/karyawan/pegawai masih lebih besar dibandingkan status pekerjaan . Penduduk yang bekerja sebagai buruh/karyawan adalah sebesar 58,52 persen.gkan tahun 2015 ada penurunan sebesar 1,40 persen. Demikian juga dengna penduduk yang berusaha dibantu buruh tetap juga mengalami penurunan yaitu dari 7,11 persen tahun 2015 menjadi 5,65 per-

Gambar 4.7 Persentase Penduduk Berumur 15 Tahun Ke Atas yang Bekerja Selama Seminggu yang lalu Menurut Status Usaha, 2017



Sumber : BPS Kota Malang

Tabel 4.3 Jumlah Penduduk Berumur 15 Tahun Ke Atas yang Bekerja Selama Seminggu yang lalu Menurut Lapangan Usaha, Tahun 2015-2017

Lapangan Pekerjaan Utama	2015	2017
Jasa Kemasyarakatan, Sosial, dan Perseorangan	29,76	28,36
Perdagangan Besar dan Eceran , Rumah makan dan Hotel	34,25	31,46
Industri Pengolahan	14,31	17,05
Konstruksi	7,25	6,90
Pengangkutan dan Pergudangan dan komunikasi	5,76	5,94
Keuangan , Asuransi , Persewaan Bangunan, Tanah, dan Jasa Perusahaan	6,26	7,69
Pertanian, Kehutanan, Perburuan dan Perikanan	2,12	2,07
Listrik, Gas, dan Air	0,29	0,52
Jumlah	100,00	100,00

sen pada tahun 2017. Sedangkan untuk yang berusaha sendiri dan berusaha dibantu buruh tetap mengalami peningkatan, masing-masing meningkat 1,61 persen dan 1,43 persen dibandingkan tahun 2015. Keadaan ini mengindikasikan adanya kecenderungan peningkatan status tetapi cenderung untuk berusaha sendiri yang dibantu buruh tidak tetap. Adanya ketentuan Upah minimum regional (UMR), menyebabkan yang berusaha sendiri untuk menggunakan pekerja tidak tetap.

4.4. Jumlah Jam Kerja

Pekerja yang bekerja jauh di bawah jam kerja rata-rata selama seminggu (kurang dari 35 jam) dikategorikan sebagai pengangguran terselubung. Biasanya pekerja semacam ini memiliki pendapatan di bawah kemampuan sebenarnya. Selain itu pula seseorang yang bekerja di bawah 35 jam merupakan orang-orang yang mempunyai kemampuan tetapi tidak mendapatkan pekerjaan yang sesuai dengan kemampuan, keahlian atau ketrampilannya. Sementara itu pekerja yang dikategorikan sebagai bukan setengah pengangguran adalah mereka yang memiliki jumlah jam kerja normal selama seminggu (minimal 35 jam).

Secara umum persentase pekerja yang bekerja kurang dari 35 jam atau pengangguran terselubung selama seminggu yang lalu pada tahun 2017 sebesar 18,88 persen. Pengangguran terselubung di Kota Malang terbanyak pada kelompok umur 35-39 mencapai 14,51 persen.

<https://malangkota.bps.go.id>



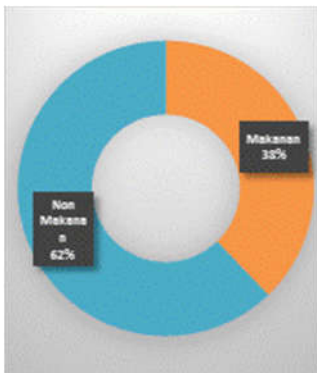
5. TARAF DAN POLA KONSUMSI

Pola konsumsi masyarakat menunjukkan suatu hasrat masyarakat untuk mengkonsumsi barang maupun jasa. Hasrat untuk mengkonsumsi dipengaruhi oleh seberapa besar pendapatan mereka yang dialokasikan untuk konsumsi. Bisa diartikan bahwa konsumsi seseorang berbanding lurus dengan pendapatannya, semakin besar pendapatan semakin besar pula pengeluaran konsumsi. Sehingga bisa dikatakan bahwa pola konsumsi menjadi indikator kesejahteraan rumah tangga/keluarga.

5.1. Pengeluaran Rumah Tangga

Pola konsumsi dapat dikenali berdasarkan alokasi penggunaannya, secara garis besar alokasi pengeluaran konsumsi masyarakat digolongkan kedalam dua kelompok penggunaan, yaitu pengeluaran untuk makanan dan pengeluaran untuk bukan makanan. Struktur konsumsi masyarakat Kota Malang mulai mengalami perkembangan, sebagian besar pengeluaran konsumsinya tidak lagi untuk konsumsi makanan tetapi untuk konsumsi bukan makanan. Pergeseran pola konsumsi ini dipengaruhi oleh perubahan pendapatan seseorang. Semakin tinggi pendapatan, cenderung akan semakin tinggi pengeluaran untuk bukan makanan. Pergeseran pola pengeluaran terjadi karena elastisitas permintaan terhadap makanan pada umumnya rendah, sebaliknya elastisitas permintaan terhadap barang bukan makanan pada umumnya tinggi. Keadaan ini jelas terlihat pada kelompok penduduk yang tingkat konsumsi makanannya sudah mencapai titik jenuh, sehingga peningkatan pendapatan akan digunakan untuk memenuhi kebutuhan bukan makanan atau ditabung.

Gambar 5.1
Rata-rata Pengeluaran
Perkapita Sebulan Menurut
Jenis Pengeluaran 2017



Sumber : BPS Kota Malang

Tabel 5.1 Rata-rata pengeluaran per Kapita Menurut Jenis Pengeluaran, Tahun 2016-2017

Jenis Pengeluaran	Nominal (Rp)		Persentase	
	2016	2017	2016	2017
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Makanan	523.578	632.530	38,63	37,85
Bukan Makanan	831.897	1.038.695	61,37	62,15
- Perumahan	401.018	516.743	29,59	30,92
- Barang dan Jasa	232.563	295.482	17,16	17,68
- Pakaian	40.429	49.382	2,98	2,95
- Barang Tahan Lama	88.078	96.332	6,50	5,76
- Lainnya	69.809	80.757	5,15	4,83
Jumlah	1.355.475	1.671.225	100,00	100,00

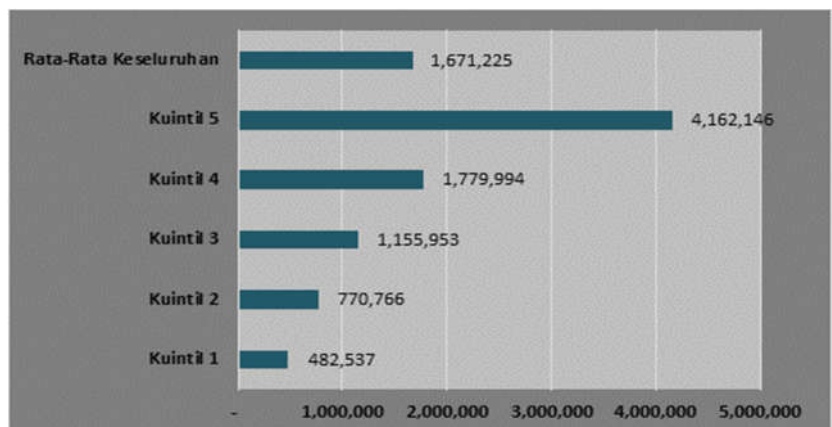
Sumber: SUSENAS Kota Malang 2016-2017

Gambaran konsumsi masyarakat dapat dilihat pada tabel 5.1, selama 2016-2017 rata-rata pengeluaran per kapita sebulan penduduk meningkat dari Rp 1.355.475,- menjadi Rp 1.671.225,- Dimana pada tahun 2016 sekitar Rp. 523.578,- atau 38,63 persen dikeluarkan untuk konsumsi makanan, sedangkan Rp. 831.887,- atau 61,37 persen dikeluarkan untuk konsumsi bukan makanan. Pada Tahun 2017 sekitar Rp. 632.530,- atau 37,85 persen dikeluarkan untuk konsumsi makanan dan Rp. 1.038.695,- atau 62,15 persen untuk konsumsi bukan makanan. Dilihat dari persentase tersebut pengeluaran untuk makanan justru mengalami penurunan dan sebaliknya pengeluaran bukan makanan makanan. Penurunan terjadi pada kelompok pengeluaran Perumahan sebesar 2,17 persen dan sedikit pada kelompok Barang dan Jasa yaitu sebesar 0,83 persen. Peningkatan pengeluaran pada kelompok bukan makanan terjadi pada kelompok Pakian, Barang Tahan Lama dan lainnya..

Dalam kaca mata ekonomi, kesejahteraan penduduk dapat dilihat dari besaran pendapatannya. Semakin tinggi pendapatan perkapita penduduk, dianggap semakin sejahtera. Namun untuk memperoleh informasi tentang pendapatan rumahtangga sangatlah sulit, Susenas dalam mengukur kesejahteraan menggunakan pendekatannya pengeluaran. Secara umum jumlah pengeluaran berbanding lurus dengan pendapatan. Rumahtangga yang pengeluarannya banyak tentunya mempunyai pendapatan yang besar pula, kondisi ini dapat mencerminkan tingkat kemampuan ekonomi masyarakat. Kemampuan daya beli masyarakat dapat memberikan gambaran tentang tingkat kesejahteraan masyarakat. Semakin tinggi daya beli masyarakat menunjukkan peningkatan kemampuan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya dan menjadi salah satu indikasi peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Data Susenas memberikan informasi kesejahteraan masyarakat yang direpresentasikan melalui pengeluaran konsumsi rumah tangga. Pada Gambar 2 terlihat rata-rata per kapita sebulan berdasarkan kuintil. Pada Kuintil ke 5 atau 20 persen jumlah penduduk terakhir rata-rata pengeluaran per kapita sebulannya mencapai Rp. 4.162.146,-, tertinggi kedua se Jaawa Timur setelah Kota Surabaya.

Gambar 5.2
Rata-Rata Pengeluaran Per Kapita Sebulan
Menurut Kuintil Pengeluaran , 2017



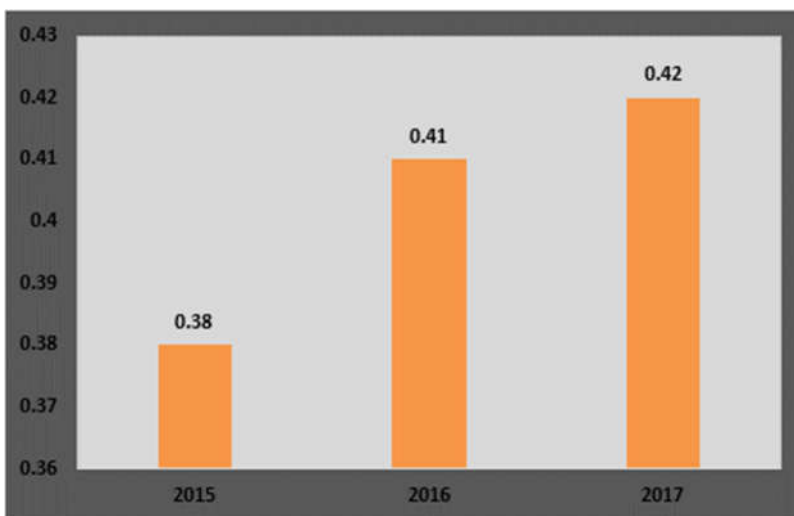
Sumber: Susenas 2017

Pergeseran persentase pengeluaran rumah tangga dari kelas pengeluaran yang lebih rendah ke kelas pengeluaran yang lebih tinggi, mengandung dua kondisi, yaitu pertama terjadi karena adanya peningkatan kesejahteraan rumah tangga atau kedua karena adanya peningkatan harga berbagai kebutuhan rumah tangga. Meningkatnya kesejahteraan penduduk biasanya juga ditandai dengan semakin berkurangnya proporsi pengeluaran untuk keperluan makanan yang selanjutnya bergeser pada pengeluaran untuk keperluan bukan makanan.

Salah satu indikator untuk mengukur tingkat pemerataan pendapatan penduduk adalah Indeks Gini. Nilai dari indeks ini berkisar antara 0 dan 1. Semakin mendekati 0 dikatakan bahwa tingkat ketimpangan pengeluaran antar kelompok pengeluaran semakin rendah, sebaliknya semakin mendekati 1 dikatakan bahwa tingkat ketimpangan pengeluaran antar kelompok pengeluaran semakin tinggi.

Indeks Gini Kota Malang tahun 2016 mengalami kenaikan 0,03 poin dibandingkan tahun 2015 yaitu dari 0,38 meningkat menjadi 0,41. Artinya tingkat ketimpangan antar kelompok pengeluaran semakin meningkat dari tahun 2015 ke tahun 2016. Demikian juga pada tahun 2017 ketimpangan di Kota Malang meningkat 0.01 poin disbanding tahun 2016, yaitu dari 0.41 pada tahun 2016 menjadi 0.42 pada tahun 2017.

Gambar 5.3
Indeks Gini Kota Malang 2015-2017





6. PERUMAHAN DAN LINGKUNGAN

Salah satu kebutuhan dasar bagi kehidupan manusia adalah adanya rumah tinggal. Selain merupakan kebutuhan yang mendasar, rumah tinggal juga merupakan faktor penentu indikator kesejahteraan rakyat. Rumah sebagai tempat tinggal juga mempunyai pengaruh terhadap produktivitas kerja seseorang karena selain sebagai tempat tinggal atau hunian juga berfungsi sebagai tempat pusat pendidikan, pembinaan keluarga dan peningkatan kualitas generasi yang akan datang. Keadaan perumahan yang baik dapat menunjang usaha pembangunan ekonomi, karena dengan kualitas kehidupan yang layak melalui pemenuhan kebutuhan tempat tinggal maka akan terwujud kesejahteraan rakyat.

Undang-Undang No. 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Pemukiman mencantumkan bahwa salah satu tujuan diselenggarakannya perumahan dan kawasan permukiman yaitu untuk menjamin terwujudnya rumah yang layak huni dan terjangkau dalam lingkungan yang sehat, aman, serasi, teratur, terencana, terpadu, dan berkelanjutan. Definisi perumahan itu sendiri merupakan kumpulan rumah sebagai bagian dari permukiman, baik perkotaan maupun perdesaan yang dilengkapi dengan prasarana, sarana, dan fasilitas umum sebagai hasil upaya pemenuhan rumah yang layak huni.

Status sosial seseorang juga dapat ditunjukkan melalui kualitas/kondisi rumah. Semakin tinggi status sosial seseorang semakin besar peluang untuk memenuhi kebutuhan akan tempat tinggal dengan kualitas yang lebih baik. Salah satu fasilitas perumahan yang dapat mencerminkan kesejahteraan adalah kualitas material seperti jenis atap, dinding dan lantai terluas yang digunakan. Selain itu, juga memenuhi fasilitas penunjang lain yang meliputi luas lantai hunian, sumber air minum, fasilitas tempat buang air besar dan sumber penerangan. Kualitas perumahan yang baik dan penggunaan fasilitas perumahan yang memadai akan memberikan kenyamanan bagi penghuninya.

6.1. Kualitas Rumah Tinggal

Secara umum rumah tinggal yang dapat dikategorikan ke dalam rumah yang layak huni harus memenuhi beberapa kriteria kualitas rumah tempat tinggal seperti memiliki lantai, dinding dan atap yang memenuhi syarat, serta mempunyai luas lantai yang mencukupi/sebanding dengan banyaknya orang yang tinggal di dalamnya, termasuk fasilitas penerangan, air minum dan tempat pembuangan akhir/tinja. Selain itu kualitas bangunan tempat tinggal dapat mencerminkan kondisi sosial ekonomi dari penghuninya. Rumah dengan bangunan yang kualitasnya baik tentunya kondisi ekonominya juga lebih baik dibandingkan mereka yang menempati rumah dengan kualitas bangunan yang rendah.

Berdasarkan data Susenas 2017, persentase rumah tangga di Kota Malang yang berlantaikan bukan tanah sebesar 99,25 persen. Jika dibandingkan tahun 2016 terjadi peningkatan sebesar 1,33 persen.

Tabel 6.1. Rumah Tangga Menurut Beberapa Indikator Kualitas Perumahan, 2016 dan 2017

Indikator Kualitas Perumahan	2016	2017
(1)	(2)	(3)
Lantai bukan tanah (%)	97,92	99,25
Atap beton, genteng, sirap dan asbes (%)	100	100
Dinding terluas tembok dan kayu (%)	98,40	99,15

Sumber: Susenas 2016-2017

Indikator lain yang dapat digunakan untuk melihat kualitas rumah tinggal adalah penggunaan atap dan dinding terluas. Pada tahun 2017 rumah tempat tinggal dengan atap beton, genteng, sirap dan asbes di Kota Malang sebesar 99,15 persen. Jika dibandingkan tahun 2016 meningkat 0,75 persen. Sedangkan untuk atap 100 persen rumah tangga telah menggunakan atap dari beton, genteng, sirap dan asbes.

Pada tahun 2015 jika dilihat berdasarkan kabupaten/kota terdapat 18 kabupaten/kota yang memiliki rata-rata luas lantai per kapita yang lebih tinggi dari provinsi. Kabupaten/kota di Jawa Timur yang memiliki rata-rata luas lantai per kapita tertinggi adalah kabupaten Magetan (43,51 m²), kabupaten Ngawi (40,57 m²) dan kota Madiun (39,80 m²). Dan sisanya sebanyak 20 kabupaten/kota di bawah persentase Jawa Timur, dimana kabupaten Pasuruan memiliki persentase rata-rata luas lantai per kapita terendah yaitu sebesar 20,91 m².

6.2. Fasilitas Rumah Tinggal

Fasilitas rumah tinggal seperti ketersediaan air bersih, sanitasi yang layak, serta penerangan yang baik merupakan faktor yang menentukan kualitas dan kenyamanan rumah tinggal. Salah satu kebutuhan yang sangat penting bagi rumah tangga dalam kehidupan sehari-hari adalah air, sehingga ketersediaan dalam jumlah yang cukup terutama untuk keperluan dikonsumsi dan sanitasi merupakan tujuan dari program penyediaan air bersih yang terus menerus diupayakan pemerintah.

Pada tahun 2017, rumah tangga di Kota Malang yang menggunakan air minum bersih telah mencapai 100 persen. Sedangkan yang menggunakan air kemasan, isi ulang dan ledeng tahun 2017 meningkat dibandingkan tahun 2016 yaitu dari 66,44 persen naik menjadi 70,86 persen

Tabel 6.2. Persentase rumahtangga menurut beberapa fasilitas perumahan, 2016 dan 2017

Indikator Fasilitas Perumahan	2016	2017
(1)	(2)	(3)
Air kemasan, air isi ulang & ledeng	66,44	70,86
Air minum bersih	100	100
Jamban sendiri	76,92	80,54
Jamban sendiri dengan tangki septik	81,77	83,02
Sumber penerangan listrik	100	100

Sumber: Susenas 2016-2017

Fasilitas perumahan yang cukup penting peranannya dalam usaha sanitasi adalah penyediaan sarana jamban. Jika dilihat dari segi kesehatan lingkungan dan masyarakat, masalah pembuangan kotoran manusia dapat mencemari lingkungan terutama tanah dan sumber air. Untuk mencegah dan mengurangi kontaminasi terhadap lingkungan maka pembuangan kotoran manusia harus dikelola dengan baik sesuai dengan ketentuan jamban yang sehat. Hal ini dapat dilihat dari ketersediaan jamban sendiri dengan tangki septik. Pada tahun 2017, rumah tangga yang menggunakan jamban dengan tangki septik sudah mencapai 83,02 persen atau mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2016 (81,77persen).

Sumber penerangan merupakan fasilitas perumahan yang penting. Sumber penerangan yang ideal adalah yang berasal dari listrik (PLN dan Non PLN), karena cahaya listrik lebih terang dibanding sumber penerangan lainnya. Rumah tangga di Kota Malang yang telah menikmati fasilitas penerangan listrik tahun 2017 telah mencapai 100 persen.

6.3. Status Kepemilikan Rumah Tinggal

Tingkat kesejahteraan dan peningkatan taraf hidup masyarakat dapat dilihat melalui salah satu indikatornya yaitu status kepemilikan rumah tinggal. Kondisi ekonomi rumah tangga sangat berpengaruh terhadap kepemilikan rumah tinggal. Status kepemilikan rumah tinggal yang dicakup di sini adalah rumah milik sendiri, kontrak/sewa, bebas sewa, rumah dinas, atau status rumah kepemilikan lainnya. Rumah tangga yang menempati rumah milik sendiri akan lebih tenang dibandingkan mereka yang menempati rumah sewa apalagi yang bebas sewa karena telah mampu memenuhi kebutuhan akan tempat tinggal yang terjamin dan permanen dalam jangka panjang.

Rumah tangga di Kota Malang berdasarkan hasil Susenas 2017 yang menempati rumah milik sendiri sebesar 63,89 persen dan sisanya sebesar 36,11 persen adalah bukan milik sendiri. Rumah tangga yang menempati rumah bukan milik sendiri terdiri dari kontrak/sewa sebesar 24,07 persen, bebas sewa sebesar 11,25 persen, rumah dinas sebesar 0,78 persen. Kepemilikan rumah tinggal milik sendiri tahun 2017 mengalami penurunan dibanding tahun 2016 sebesar 6,76 persen. Jika dilihat berdasarkan kabupaten/kota, di Jawa Timur Kota Malang adalah kota yang memiliki persentase terkecil kedua setelah Surabaya untuk rumah tangga yang memiliki status kepemilikan rumah milik sendiri. Sebaliknya, untuk status kepemilikan kontrak/sewa, Kota Malang justru merupakan kota yang memiliki persentase tertinggi kedua setelah Surabaya. Seperti diketahui Kota Malang dan Surabaya merupakan pusat pendidikan tinggi, secara tidak langsung memicu keberadaan mahasiswa dari luar Kota Surabaya dan Malang. Untuk tempat tinggal biasanya mereka akan kost atau kontrak. Sedangkan penambah jumlah mahasiswa dari tahun ke tahun cenderung meningkat. Keadaan ini mengindikasikan bahwa status kepemilikan rumah tinggal di Kota Malang dan Surabaya cenderung tinggi dibandingkan kota-kota lain.

Tabel 6.3. Persentase Rumah Tangga Menurut Status Kepemilikan Rumah Tinggal, 2016 dan 2017

Indikator Fasilitas Perumahan	2016	2017
(1)	(2)	(3)
Milik Sendiri	70,65	63,89
Kontrak/sewa	21,95	24,07
Bebas Sewa	6,88	11,25
Rumah Dinas	1,12	0,78
Lainnya	0,00	0,00

Sumber: BPS Kota Malang



7. KEMISKINAN

Kemiskinan merupakan suatu keadaan dimana seseorang tidak bisa memenuhi kebutuhan dasar hidupnya. Mahatma Gandhi menyebut mereka sebagai *the last, the least, the lowest, and the loss*. Pada dasarnya kemiskinan berhubungan dengan kurangnya akses seseorang terhadap fasilitas pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur. Kemiskinan telah menjadi masalah klasik yang dialami oleh setiap negara. Permasalahan ini harus dilihat dari berbagai aspek karena kemiskinan merupakan masalah multidimensi yang tidak hanya berhubungan dengan kondisi ekonomi, tetapi juga sosial dan budaya.

Penanggulangan kemiskinan menjadi salah satu agenda penting di setiap negara. Di Indonesia, tiap era kepemimpinan memiliki program khusus untuk pengentasan kemiskinan. Pada masa orde baru pernah digalakkan program Inpres Desa Tertinggal (IDT) yang bertujuan menanggulangi permasalahan ketersediaan infrastruktur di desa-desa yang relatif belum maju. Pada masa kepemimpinan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dibentuk Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) yang merupakan tim lintas sektor dan lintas pemangku kepentingan di tingkat pusat untuk menyelaraskan berbagai kegiatan percepatan penanggulangan kemiskinan. Sementara itu, masa kepemimpinan Jokowi-JK juga menempatkan pengentasan kemiskinan sebagai salah satu fokus utama pemerintah sebagaimana tertuang dalam sembilan agenda prioritas, nawa cita, yaitu meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia melalui peningkatan kualitas pendidikan dan pelatihan, peningkatan layanan kesehatan masyarakat, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat.

7.1 Perkembangan Penduduk Miskin di Kota Malang

Kemiskinan merupakan permasalahan bangsa yang mendesak dan memerlukan langkah-langkah penanganan dan pendekatan yang sistemik, terpadu dan menyeluruh. Dalam rangka memenuhi kebutuhan-kebutuhan dasar warga negara, diperlukan langkah-langkah strategis dan komprehensif (TNP2K, 2014). Pemerintah Provinsi Jawa Timur sebagaimana tertuang dalam misinya, *Makin Mandiri dan Sejahtera Bersama Wong Cilik*, telah melakukan berbagai upaya untuk mengurangi angka kemiskinan di Kota Malang. Pemerintah terus meningkatkan dan menyempurnakan berbagai program penanggulangan kemiskinan, terutama program Jalinkesra. Serta meningkatkan kemampuan dan pendapatan rumah tangga miskin melalui kemudahan akses modal.

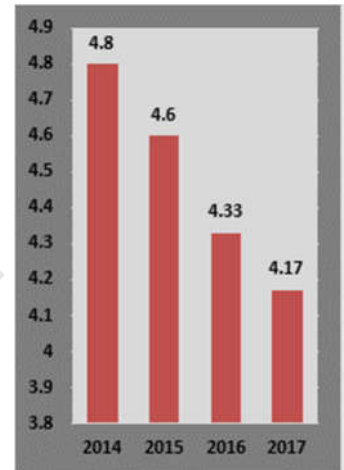
Selama tahun 2011-2015, persentase penduduk miskin di Jawa Timur cenderung menurun seiring banyaknya program pengentasan kemiskinan yang digalakkan oleh pemerintah. Pada tahun 2013 penduduk miskin Kota Malang sebesar 4,85 persen, sampai tahun 2016 turun tinggal 4,33 persen. Tingkat kemiskinan di Kota Malang menduduki peringkat paling rendah dibandingkan kab/kota di Jawa Timur.

7.2 Garis Kemiskinan, Indeks Kedalaman Kemiskinan dan Indeks Keparahan Kemiskinan

Garis Kemiskinan merupakan batas yang digunakan untuk mengelompokkan penduduk miskin dan tidak miskin. Penghitungan garis kemiskinan dilakukan terpisah antara daerah perkotaan dan perdesaan. Penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per bulan di bawah garis kemiskinan. Untuk Kota Malang seluruh daerah merupakan perkotaan. Garis kemiskinan Kota Malang mengalami peningkatan antar waktu selama 2014-2017. Pada 2014 garis kemiskinan Kota Malang sebesar Rp. 381.400,- dan terus meningkat hingga mencapai Rp. 454.061,- pada tahun 2017.

Kemiskinan harus dipandang secara luas agar dalam implementasi kebijakannya dapat dilaksanakan dengan efektif dan efisien. Kemiskinan

Gambar 7.1
Persentase Penduduk Miskin Kota Malang, 2014-2017 (Persen)



Tabel 7.2 Garis Kemiskinan, Indeks Kedalaman Kemiskinan (P_1), dan Indeks Keparahan Kemiskinan (P_2) Kota Malang, 2013-2016

Kemiskinan	2014	2015	2016	2017
Garis Kemiskinan	381.400	411.709	426.527	454.061
Indeks Kedalaman Kemiskinan (P_1)	0,43	0,53	0,54	0,56
Indeks Keparahan Kemiskinan (P_2)	0,06	0,11	0,09	0,12

bukan hanya persoalan banyaknya penduduk miskin, tetapi juga seberapa besar jarak rata-rata pengeluaran penduduk miskin terhadap garis kemiskinan (tingkat kedalaman) yang disebut sebagai P_1 , dan keragaman pengeluaran antar penduduk miskin (P_2).

Indeks kedalaman kemiskinan (P_1) mencapai 0,43 pada 2014. sampai tahun 2017 Indeks kedalaman Kemiskinan naik 0,13 poin, yaitu sebesar 0,56. Kenaikan P_1 ini menunjukkan rata-rata pengeluaran penduduk miskin terhadap garis kemiskinan semakin jauh. Dengan kata lain penduduk Kota Malang.

Indeks keparahan kemiskinan (P_2) Kota Malang memiliki pola yang berfluktuasi antar waktu. Pada Maret 2014 P_2 Kota Malang sebesar 0,06 dan sedikit meningkat pada 2015 menjadi 0,11. Pada tahun 2016 P_2 menurun menjadi 0,09 dan pada 2017 meningkat 0,03 poin menjadi 0,12. Nilai P_2 yang cenderung meningkat ini menandakan ketimpangan pendapatan di antara penduduk miskin semakin lebar. Sedangkan nilai P_2 meningkat artinya ketimpangan pendapatan diantara penduduk miskin lebih lebar.

Karakteristik rumah tangga miskin dapat dilihat dari kondisi pendidikan dan ketenagakerjaan dari anggota rumah tangga, serta kondisi perumahan rumah tangga. Pemahaman mengenai karakteristik rumah tangga miskin penting sebagai dasar penyusunan kebijakan dan program pengentasan kemiskinan agar lebih tepat sasaran.

<https://malangkota.bps.go.id>

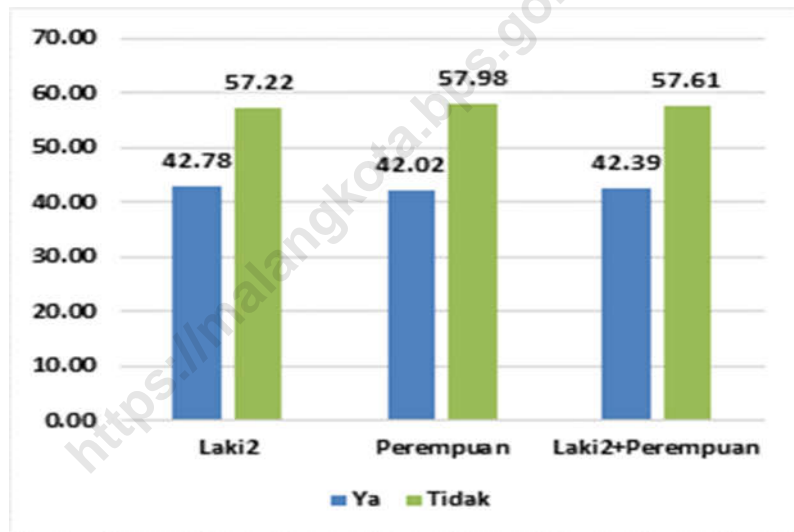


8. SOSIAL LAINNYA

8.1. Persentase Penduduk yang Melakukan Perjalanan

Melakukan perjalanan adalah bagian kebutuhan dasar manusia. Perjalanan dilakukan selain untuk aktivitas pekerjaan, juga untuk mencukupi kebutuhan rohani. Penduduk Kota Malang selama enam bulan terakhir yang melakukan perjalanan sebesar 4,5 persen.

Gambar 8.1 Persentase Penduduk Kota Malang yang Melakukan Perjalanan 2017



Sumber: BPS Kota Malang

Berbagai tujuan yang dilakukan penduduk Kota Malang untuk melakukan perjalanan. Tujuan perjalanan yang dilakukan oleh penduduk Kota Malang sebagian besar digunakan untuk mengunjungi teman/keluarga (69,80 persen) dan Berziarah/keagamaan (12,66 persen).

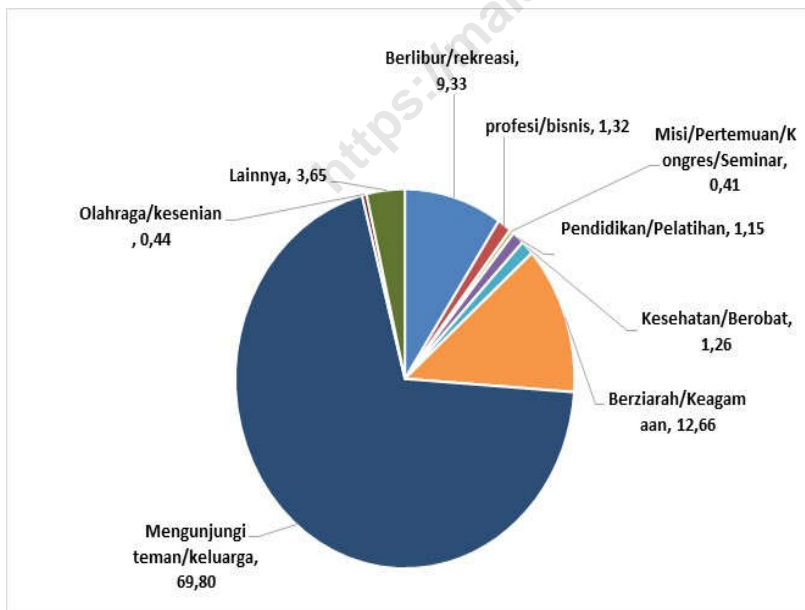
Penduduk Kota Malang mayoritas muslim mempunyai budaya pulang kampung pada hari raya Idul Fitri. *Peak season* penduduk yang melakukan perjalanan terjadi antara H-7 hingga H+7 hari raya. Perekonomian berjalan cukup cepat pada momen musiman itu di seluruh sektor ekonomi. Fenomena tersebut menjelaskan mengapa persentase penduduk yang melakukan perjalanan terbanyak dengan tujuan mengunjungi keluarga/teman.

Perjalanan terbanyak kedua dimanfaatkan untuk berziarah/keagamaan. Salah satu kebiasaan masyarakat Kota Malang adalah melakukan ziarah kubur pada hari tertentu, yaitu pada hari kamis malam jumat legi. Disamping itu salah satu agenda rutin yang sering dilakukan Majelis Taklim melakukan ziarah wali.

Untuk menghilangkan kepenatan dalam mengerjakan rutinas sehari-hari, banyak orang memilih rekreasi. Kawasan Malang Raya merupakan pusat destinasi wisata Jawa Timur. Kawasan pantai Selatan Kabupaten Malang merupakan kawasan yang sedang berkembang disamping kawasan Kota Batu. Fenomena masyarakat untuk mengetahui destinasi sepanjang pantai Selatan Kabupaten Malang mendorong tingkat rekreasi penduduk Kota Malang cukup memberikan kontribusi yang ketiga besar sebagai tujuan utama melakukan perjalanan, yaitu sebesar 9,33 persen.

Tujuan utama lainnya seperti bepergian untuk bisnis, pendidikan dan sebagainya kurang dari 5 persen, terendah tercatat pada tujuan utama untuk Misi/Pertemuan atau sebesar 0,5 persen.

Gambar 8.2 Persentase Tujuan Utama Penduduk Kota Malang



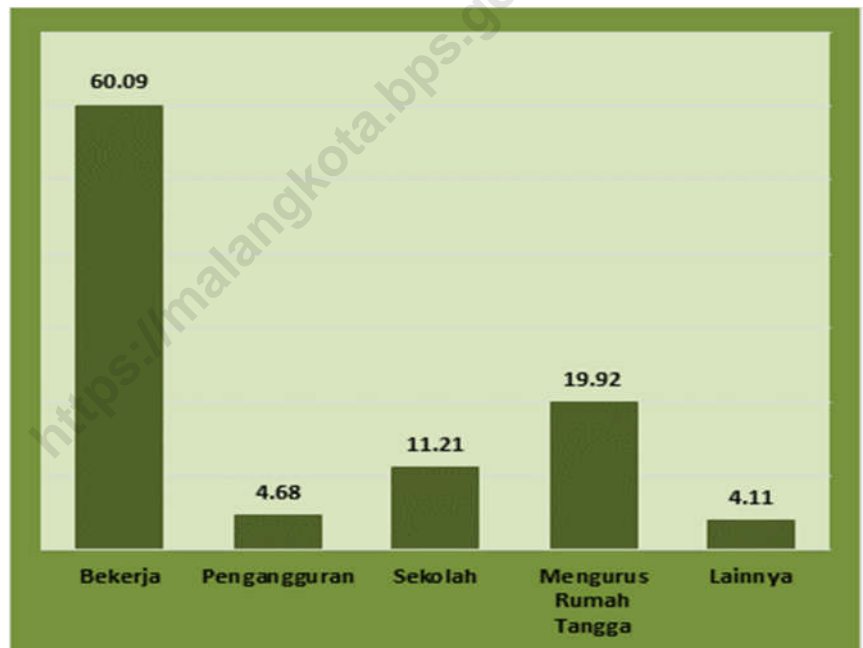
Sumber: BPS Kota Malang

8.2. Persentase Penduduk Menurut Jenis Kegiatan

Menurut kegiatannya, penduduk usia 10 tahun ke atas dibagi menjadi empat kelompok besar yaitu penduduk yang bekerja, sekolah, mengurus rumah tangga dan melakukan kegiatan lainnya.

Persentase penduduk usia 15 tahun ke atas yang melakukan kegiatan bekerja tercatat terbanyak dibanding kegiatan lainnya. (60,09 persen). Terbanyak kedua adalah penduduk yang mengurus rumah tangga (19,92 persen)

Gambar 8.3 Persentase Penduduk Kota Malang Menurut Kegiatan 2017



Distribusi penduduk ketiga yang terbesar adalah yang penduduk yang sedang bersekolah (11,21 persen). Sedangkan 4,68 persen penduduk menganggur. Selebihnya 4,11 persen penduduk melakukan kegiatan lainnya .

Sedangkan 20,3 persen selama seminggu terakhir melakukan kegiatan mengurus rumah tangga., 13,7 persen melakukan kegiatan lainnya selain bekerja, mengurus rumah tangga dan sekolah.

8.3. Persentase Penduduk yang Mempunyai Akses Teknologi Informasi dan Komunikasi

Hal yang tak kalah menarik untuk mengetahui seberapa jauh perkembangan kesejahteraan rakyat dengan melihat penguasaan/ kepemilikan akses teknologi informasi dan komunikasi.

Di abad ke 20 ini, kemajuan teknologi informasi berkembang cepat. Era penggunaan telepon sudah bergeser ke *hand phone* (HP). Bagi masyarakat sekarang, HP lebih praktis dan ekonomis dibanding telepon. Memiliki HP tidak memerlukan biaya pemasangan dan tidak tergantung adanya sarana kabel telepon. Cukup dengan tower signal, penggunaan HP bisa dilakukan dimana saja.

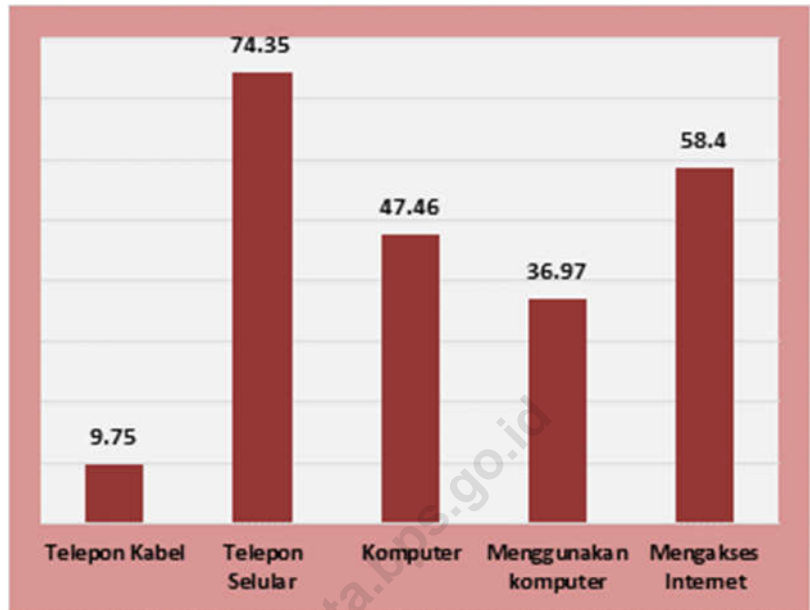
Di samping itu, pembelian pulsa HP bisa disesuaikan dengan kondisi keuangan masing-masing individu. Bahkan hanya dengan perangkat HP, siapapun bisa melakukan akses internet dengan tujuan yang lebih luas.

Kepopuleran HP dibandingkan telepon bisa ditunjukkan dari hasil data Susenas terakhir. Rumah tangga yang mempunyai telepon di rumah pada tahun 2017 tercatat 9.79 persen. Kondisi ini berbeda jauh dengan rumah tangga yang anggotanya mempunyai HP yang mencapai 74.35 persen. Rumah tangga yang menggunakan HP merasa cukup terbantu dibanding yang menggunakan telepon. Berbagai aplikasi yang ditawarkan oleh Perusahaan Komunikasi selular, menjadikan HP sebagai alat komunikasi yang paling diminati di kalangan masyarakat.

Dengan memanfaatkan aplikasi HP, rumah tangga bisa melakukan komunikasi lewat BBM, facebook, whatshapp, Line dan lain sebagainya yang tidak kesemuanya tidak bisa dinikmati pengguna telepon biasa.

Rumah tangga yang menguasai HP mencapai 77.36 persen. Dari tahun ke tahun penguasaan HP oleh rumah tangga cenderung meningkat.

Gambar 8.4 Persentase Rumah Tangga yang Menguasai/Memiliki Alat Komunikasi dan Informasi di Kota Malang 2017



Sumber: BPS Kota Malang

Kelebihan lainnya, untuk daerah-daerah terpencil yang tidak mempunyai jaringan telepon, rumah tangga bisa melakukan komunikasi melalui HP berkat adanya tower signal di daerah tersebut.

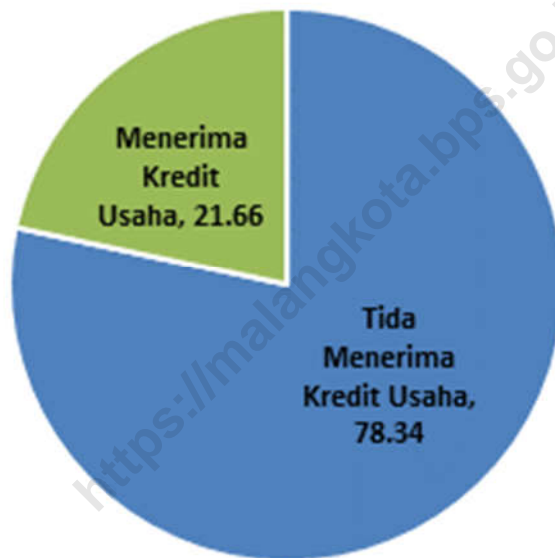
Sementara, dari seluruh rumah tangga di Kota Malang, anggota rumah tangganya yang menguasai atau memiliki alat informasi berupa komputer atau laptop tercatat sebesar 47,46 persen. Persentase ini diduga semakin meningkat dari tahun ke tahun seiring semakin meningkatnya kebutuhan pendidikan dan informasi.

Beberapa rumah tangga memanfaatkan komputer dan laptop sebagai sarana penunjang pendidikan dan mengembangkan bisnis (hasil usaha). Berbagai produk usaha dapat dipasarkan dengan menggunakan komputer dan laptop yang terhubung jaringan internet memunculkan pasar online. Pendek kata, penggunaan alat komunikasi dan informasi semakin diperlukan dan berkembang di tengah masyarakat Kota Malang.

8.4. Persentase Penduduk Penerima Kredit Usaha dan Penerima Pelayanan Kesehatan Gratis

Untuk meningkatkan produktivitas usaha masyarakat, banyak tersedia kredit usaha dari Pemerintah dan Swasta. Bahkan untuk mendukung usaha mikro kecil dan menengah, Pemerintah Kota Malang mengeluarkan program kredit usaha rakyat (KUR) dengan prosedur yang mudah dan bunga yang relatif murah.

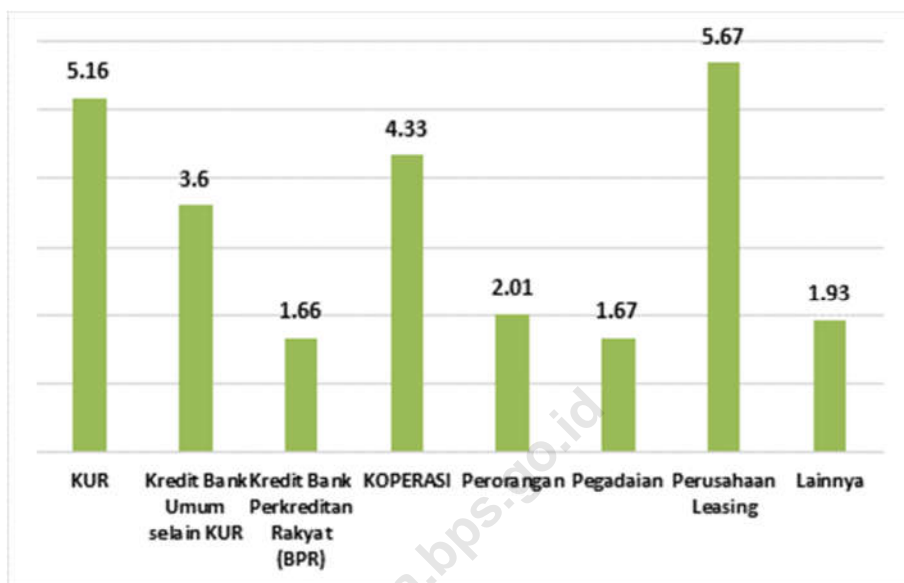
Gambar 8.4. Persentase Rumah Tangga Penerima Kredit Usaha di Kota Malang Tahun 2017



Terkait kredit usaha rakyat, tidak sedikit masyarakat yang masih minim pengetahuannya tentang kredit usaha. Akibatnya, di antaranya terjebak pada rentenir dan sistem ijon. Sosialisasi KUR juga dirasakan minim. Hal ini menyebabkan rumah tangga yang memanfaatkan kredit usaha tidak begitu banyak.

Rumah tangga di Kota Malang yang menerima kredit usaha pada tahun 2017 hanya tercatat 21,66 persen. Dari total penerima kredit usaha, terbanyak menggunakan jasa perusahaan leasing atau sebesar 37,6 persen, diikuti program bank selain KUR (17,79 persen) dan program KUR Pemerintah

Gambar 8.5 Persentase Penduduk Penerima Kredit Usaha Menurut Jenis Kredit Usaha di Kota Malang 2017

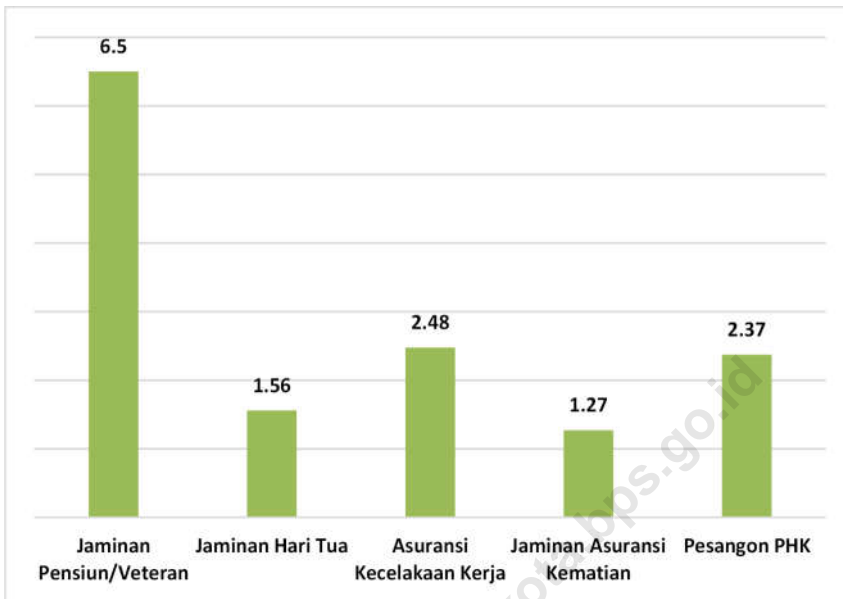


Sumber: BPS Kota Malang

Dua jenis kredit usaha yang sering digunakan penerima kredit usaha adalah Perseorangan (lainnya) dan Perorangan (Dengan Bunga) masing-masing 19,07 persen dan 7,62 persen. Bagi rumah tangga yang tidak ingin berurusan dengan administrasi sebagai bagian prosedur pada lembaga pembiayaan, meminjam uang kepada individu atau seseorang untuk usaha menjadi hal yang sudah biasa. Padahal resiko meminjam kepada individu atau perseorangan cukup beresiko karena kebanyakan berbunga tinggi. Meskipun demikian, persentase di atas 19 persen menindikasikan ada kecenderungan meminjam uang secara individu atau kepada perseorangan untuk usaha masih menjadi alternatif favorit.

Selain adanya program kredit usaha, program kesejahteraan rakyat di Kota Malang juga melalui pemberian pelayanan kesehatan gratis. Dari seluruh penduduk Kota Malang yang berobat dan yang memperoleh pelayanan kesehatan gratis tercatat sebanyak 18,78 persen. Berdasarkan jenis kelamin, penerima pelayanan kesehatan gratis terdiri 19,71 persen penduduk laki-laki dan 17,87 persen penduduk perempuan.

Gambar 8.6 Persentase Rumah Tangga Mengenai Kepemilikan Jaminan Pembiayaan/Asuransi Kesehatan Selama Setahun di Kota Malang Tahun 2017



Sumber: BPS Kota Malang

Dari total seluruh penduduk yang Jaminan kesehatan tercatat sebanyak 51,7 persen. Rumah tangga yang memiliki jaminan pembiayaan/asuransi kesehatan terbanyak adalah jaminan pembiayaan/asuransi kesehatan terbanyak adalah jaminan pensiun/veteran sebesar 6,5 persen, sedangkan yang paling sedikit adalah Jaminan Asuransi Kematian yang hanya 1,27 persen.

Jaminan pelayanan kesehatan di Kota Malang sangat dirasakan oleh masyarakat, mengingat biaya berobat di rumah sakit umum dan swasta termasuk membeli obat masih relatif mahal. Dari target seluruh penduduk memiliki jaminan kesehatan tentunya masih harus menjadi perhatian pemerintah daerah dalam menyukseskan program ini.

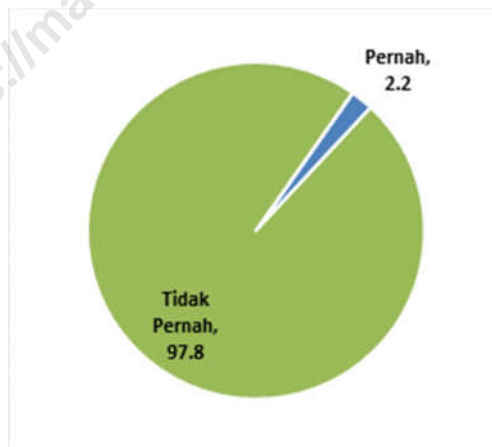
Di Kota Malang sendiri, untuk meringankan biaya berobat bagi warga miskin selain dari program layanan kesehatan yang berasal dari Pemerintah dan swasta, juga terdapat lembaga sosial lainnya yang turut menyediakan pembiayaan kesehatan gratis. Lembaga sosial tersebut bisa dalam bentuk LSM, aktivitas layanan orsos/orpol, maupun yang disediakan oleh lembaga keagamaan.

8.5. Persentase Penduduk yang Pernah Menjadi Korban Kejahatan

Kenyamanan individu dari kejahatan merupakan salah satu bagian dari kesejahteraan rakyat. Semakin sejahtera suatu wilayah, semakin aman masyarakatnya dari tindak kejahatan.

Pada tahun 2017 tercatat penduduk Kota Malang yang mengalami tindak kejahatan 2.2 persen. Kejahatan meliputi pencurian, penganiayaan, perampokan, pelecehan seksual, dan kejahatan lainnya.

Gambar 8.7. Persentase Penduduk Kota Malang Yang Pernah Mengalami Korban Kejahatan



Sumber: BPS Kota Malang

Korban kejahatan terbanyak tercatat adalah korban pencurian, yaitu sebanyak 2,05 persen, sedangkan pencurian dengan kekerasan mencapai 0,07 persen.

<https://malangkota.bps.go.id>

LAMPIRAN

<https://mala.gkoiapb399.nl>



Indikator Kependudukan

No	Indikator Kependudukan	2014	2015	2016	2017
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Jumlah Penduduk				
	Laki-laki (Jiwa)	416.982	419.713	422.276	424.811
	Perempuan (Jiwa)	428.991	431.585	434.134	436.603
	Jumlah Laki-laki+Perempuan (Jiwa)	845.973	851.298	856.410	861.414
2	Rasio Jenis Kelamin	97,20	97,25	97,27	97,28
3	Rasio Ketergantungan	37,64	37,13	36,92	37,65
4	Kepadatan Penduduk (Jiwa/Km ²)	7.686	7.735	7.781	7.827
5	Pertumbuhan Penduduk	0,61	0,63	0,60	0,58

II

(2) Indikator Kesehatan dan Gizi

No	Indikator Kesehatan dan Gizi	2014	2015	2016	2017
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Angka Kesakitan (%)	30,78	40,69	40,09	34,88
2	Rata-rata Lama Sakit (Hari)		5,72	4,63	5,32
3	Anak Usia 0-23 tahun yang Pernah diberi ASI (%)	93,91	96,70	93,05	98,77
4	Rata-rata Lamanya Pemberian ASI pada bayi Usia 0-23 Bulan (Bulan)	10,17	8,50		11,32
5	Persentase Bayi Usia 12-59 Tahun Yang Mendapatkan Imunisasi				
	BCG	97,90	96,08	96,83	97,64
	DPT	97,43	98,93	95,93	95,61
	Polio	96,70	100,00	97,80	97,64
	Campak	80,72	76,15	74,43	75,63
	Hepatitis B	95,75	97,48	96,73	93,89
6	Persentase Balita Menurut Penolong Per-salinan				
	Dokter	44,72	60,56	54,88	57,70
	Bidan	55,28	38,37	42,33	42,30
	Dukun Beranak	-	-	2,78	-
7	Persentase Penduduk yang Berobat Jalan Menurut Tempat Berobat				
	RS Pemerintah	8,33	7,73	9,71	8,68
	RS Swasta	7,37	6,05	8,67	14,46
	Prakter Dokter/ Bidan/ Poliklinik	40,05	50,11	46,72	54,41
	Puskesmas/ Pustu	36,77	37,38	35,77	26,47
	UKBM/ Praktek Nakes	9,48	0,18	0,14	0,75
	Praktek Batra	2,00	1,67	1,02	1,89
	Lainnya	0,50	2,18	0,87	0,20



Ketenagakerjaan

No	Indikator Ketenaga Kerjaan	2014	2015	2017
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Penduduk 15 Tahun ke Atas	665.465	671.937	684.015
2	Angkatan Kerja	423.631	406.935	443.035
3	Penduduk yang Bekerja	393.05	377.329	411.042
4	Pengangguran	30.581	29.606	31.993
5	Bukan Angkatan Kerja	241.834	265.002	240.98
6	Sekolah	97.114	115.451	76.669
7	Mengurus Rumah Tangga	124.864	122.571	136.231
8	Lainnya	19.856	26.98	28.08
9	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) (%)	63,66	60,56	64,77
10	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) (%)	7,22	7,28	7,22
11	Pekerja Penuh	336.795	325.106	341.475
12	Pekerja Tidak Penuh	56.255	52.223	69.567
13	Setengah Penganggur	16.985	15.086	21.175
14	Paruh Waktu	39.27	37.137	48.392
15	Berusaha Dibantu Buruh Tetap	3.20	7.11	5,65
16	Buruh/Karyawan/Pegawai	61.82	59.92	58,52
17	FORMAL	65.02	67.04	64,17
18	Berusaha Sendiri	20.41	16.21	17,82
19	Berusaha Dibantu Buruh Tidak Tetap	5.46	5.90	7,33
20	Pekerja Bebas Pertanian	0.45	0.11	0,12
21	Pekerja Bebas Non Pertanian	3.84	4.62	5,56
22	Pekerja Keluarga/Tidak Dibayar	4.83	6.13	5,00
23	INFORMAL	34.98	32.96	35,83

IV

Perumahan

No	Indikator Perumahan	2014	2015	2016	2017
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Lantai Bukan Tanah	99,06	98,83	97,92	99,25
2	Atap Beton, Genteng, Sirap, seng, Asbes	100	99,77	100	100
3	Dinding Tembok dan Kayu	99,04	98,26	98,40	99,12
4	Rumah Tangga dengan Sumber air minum Bersih	99,40	99,82	99,37	100
5	Rumah Tangga dengan jamban Milik Sendiri dilengkapi Tangki Septik	80,82	82,80	83,19	80,54
6	Rumah Tangga dengan Penerangan Listrik	100	100	99,80	100
7	Status Kepemilikan Rumah				
	Milik Sendiri	64,81	70,12	70,05	63,89
	Kontrak/Sewa	11,92	19,53	21,95	24,07
	Bebas Sewa	12,16	9,07	6,88	11,25
	Rumah Dinas	0,74	0,99	1,12	0,78
	Lainnya	0,00	0,29	0,00	0,00

DATA

Mencerdaskan Bangsa



BADAN PUSAT STATISTIK KOTA MALANG
JL. Janti Barat No.47, Malang 65148 Indonesia
Tlp. (0341) 801164, Mailbox: bps3573@bps.go.id